



TINJAUAN EKONOMI

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi

2020–2024

Volume 16, 2025



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI



TINJAUAN EKONOMI

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi

2020–2024

Volume 16, 2025

<https://jambi.bps.go.id>

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI 2020–2024

Katalog : 9199019.15

ISSN : 2774-1559

Nomor Publikasi : 15000.25038

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xii+69 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Sumber Ilustrasi:

www.Canva.com

Dilarang mereproduksi, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

**TIM PENYUSUN
TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI JAMBI 2020–2024
VOLUME 16, 2025**

Pengarah: Agus Sudibyo

Penanggung Jawab: Sumarmi

Penyunting: Oeliestina

Pengolah Data dan Penulis Naskah: Poppi Marini

Pembuat Kover dan Penata Letak: Poppi Marini

KATA PENGANTAR

Publikasi Tinjauan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi tahun 2020–2024 merupakan publikasi tahunan yang diharapkan menjadi dasar analisis mengenai perkembangan perekonomian menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi, terutama yang dilakukan oleh pengambil keputusan dan praktisi ekonomi.

Data yang terdapat dalam publikasi ini pada dasarnya memberikan gambaran laju pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi serta PDRB perkapita kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Data yang ada akan dianalisis dan diperbandingkan antar wilayah baik antar kabupaten/kota maupun antara kabupaten/kota dengan provinsi. Disajikan dengan sedikit ulasan berdasarkan pemetaan kuadran atau biasa disebut metode klassen. Potret distribusi dan pengaruh masing-masing kategori menurut lapangan usaha disajikan secara sederhana dalam bentuk tabel dan gambar.

Saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan agar publikasi ini pada waktu yang akan datang dapat lebih baik lagi. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi menyempurnakan publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Jambi, Oktober 2025
Kepala BPS Provinsi Jambi



Agus Sudibyo

DAFTAR ISI
TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI JAMBI 2020–2024
VOLUME 16, 2025

	Halaman
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
BAB 1 PENDAHULUAN	3
BAB 2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7
2.1 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto	8
2.1.1 Pengertian SNA 2008	9
2.1.2 Manfaat Perubahan Tahun Dasar.....	9
2.1.3 Implikasi Perubahan Tahun Dasar.....	9
2.2 Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9
2.3 Kategori Pertambangan dan Penggalian	10
2.4 Kategori Industri Pengolahan	10
2.5 Kategori Pengadaan Listrik dan Gas.....	11
2.6 Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	11
2.7 Kategori Konstruksi.....	12
2.8 Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13
2.9 Kategori Transportasi dan Pergudangan	13
2.10 Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....	14
2.11 Kategori Informasi dan Komunikasi.....	14
2.12 Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi.....	15
2.13 Kategori Real Estate	16
2.14 Kategori Jasa Perusahaan.....	16
2.15 Kategori Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	17
2.16 Kategori Jasa Pendidikan.....	18
2.17 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18
2.18 Kategori Jasa Lainnya.....	19

BAB 3 ANALISIS EMPAT KUADRAN	21
BAB 4 ANALISIS SEKTORAL	25
4.1 PDRB Kabupaten/Kota.....	26
4.2 Struktur Ekonomi.....	28
4.2.1 Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2024	28
4.2.2 Perbandingan Peranan Kategori Ekonomi Tahun 2020–2024.....	32
4.3 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita.....	38
4.3.1 PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2024	38
4.3.2 PDRB Perkapita Menurut Kab/Kota dengan Migas	39
4.3.3 PDRB Perkapita Menurut Kab/Kota Tanpa Migas.....	39
4.3.4 PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020–2024	40
BAB 5 PERBANDINGAN PDRB KAB/KOTA DENGAN PROVINSI ...	43
5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen), Tahun 2020–2024.....	43
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Letak Kuadran Kabupaten/Kota, 2020–2024	22
4.1 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas terhadap Total PDRB (persen), 2020–2024.....	27
4.2 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku terhadap Total PDRB (persen), 2020–2024.....	28
4.3 Struktur Perekonomian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten/Kota (persen), 2024	30
4.4 Peranan Kategori Pertanian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (persen), 2020–2024.....	32
4.5 Peranan Kategori Pertambangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (persen), 2020–2024	34
4.6 Peranan Kategori Industri Pengolahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (persen), 2020–2024	35
4.7 Peranan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (persen), 2020–2024	37
4.8 PDRB perkapita Kabupaten/Kota, 2024.....	39
4.9 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Dengan Migas), 2020 dan 2024	40
5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Dengan Migas), 2020–2024.....	44
5.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2024.....	58
5.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2024	60
5.4 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2024.....	62
5.5 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2024.....	63
5.6 Indeks Implisit PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2024.....	64
5.7 Laju Implisit PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2024	66

<https://jambi.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (persen), 2020–2024	25
4.2 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku terhadap Total PDRB Tahun (Dengan Migas), 2020–2024	27
4.3 Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Menurut Kategori di Provinsi Jambi (Dengan Migas), 2020–2024	31
4.4 Pergeseran Peranan Kategori Pertanian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2020–2024	33
4.5 Pergeseran Peranan Kategori Pertambangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2020–2024	34
4.6 Pergeseran Peranan Kategori Industri Pengolahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2020–2024	36
4.7 Pergeseran Peranan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2020–2024	37
5.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Dengan Migas dan Tanpa Migas, 2024	45
6.1 Plot Kabupaten/Kota Berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita, 2020	48
6.2 Plot Kabupaten/Kota Berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita, 2021	48
6.3 Plot Kabupaten/Kota Berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita, 2022	49
6.4 Plot Kabupaten/Kota Berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita, 2023	49
6.5 Plot Kabupaten/Kota Berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita, 2024	50

<https://jambi.bps.go.id>



Bab 1

Pendahuluan

Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan data statistik yang akurat sebagai dasar strategi dan kebijakan agar sasaran pembangunan tercapai tepat. Data berperan penting dalam perencanaan, pengawasan, evaluasi, serta pengambilan keputusan, sekaligus menggambarkan kondisi masa lalu, kini, dan target masa depan.

BAB 1 PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah, memerlukan beragam data statistik sebagai dasar penentuan strategi dan kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Data statistik yang akurat mempunyai peranan sangat besar dalam proses perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Berbagai data statistik yang merupakan ukuran kuantitas diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa lalu dan sekarang, serta sasaran yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian kegiatan usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, serta mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer, ke sektor sekunder dan tersier. Untuk mengukur tampilan perekonomian nasional digunakan indikator agregat ekonomi yang dinamakan Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Angka PDRB yang disajikan secara series dari tahun ke tahun dapat memberi gambaran tentang pertumbuhan ekonomi, perkembangan pendapatan serta sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta.

Saat ini, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi telah menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing setiap tahun. Kondisi ekonomi di masing-masing kabupaten/kota secara umum dapat dilihat melalui beberapa indikator ekonomi makro seperti besarnya nilai tambah yang dihasilkan, struktur perekonomian, laju pertumbuhan serta PDRB per kapita.

Perbedaan pertumbuhan dan arah perekonomian antara satu daerah dengan daerah lainnya, banyak disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam dan faktor produksi yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Setiap daerah memiliki kekhasan sehingga sumber kekayaan maupun pendapatan asli daerah akan berbeda-beda. Demikian juga dengan kondisi eksternal, seperti harga komoditi perkebunan atau inflasi yang juga mempengaruhi perekonomian kabupaten/kota.

Bab 2

Produk Domestik Regional Bruto



PDRB adalah total nilai tambah bruto dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu, yang mencerminkan kemampuan daerah menghasilkan pendapatan dari faktor-faktor produksi tanpa memperhatikan kepemilikannya. Secara teori, total PDRB kabupaten/kota sama dengan PDRB provinsi, namun karena perhitungannya dilakukan secara independen, sering muncul perbedaan (diskrepansi) antara keduanya.

BAB 2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PDRB merupakan hasil penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi pada suatu wilayah dan suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Dalam penghitungan PDRB yang dihitung adalah seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh semua kategori/lapangan usaha yang melakukan kegiatan usaha di suatu wilayah tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa PDRB secara aggregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa dari faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi.

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan metode langsung dengan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran, namun yang digunakan dalam penghitungan PDRB adalah dua pendekatan yaitu pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Penggunaan salah satu pendekatan ini tergantung atas ketersediaan datanya, sehingga cara penghitungan berbagai komoditi, subkategori ataupun kategori bisa berbeda.

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa pada setiap tahun yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dan dilakukan dengan menggunakan salah satu dari empat cara yang ada, yaitu revaluasi, ekstrapolasi, deflasi, atau deflasi berganda. Penggunaannya juga sangat tergantung kepada ketersediaan data, dengan cara penghitungan untuk setiap komoditi, maka subkategori ataupun kategori bisa berlainan. PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Secara teori dapat dijelaskan bahwa penjumlahan PDRB kabupaten/kota sama dengan PDRB provinsi. Sehingga resultan perekonomian yang terjadi di tingkat kabupaten/kota akan tercermin pada perubahan PDRB provinsi. Namun demikian karena penghitungannya yang independen maka ada perbedaan antara total PDRB kabupaten/kota dengan PDRB Provinsi yang disebabkan diskrepansi (*discrepancy*). Untuk tahun 2010 diskrepansi tersebut sebesar 0 (nol) persen. Tahun 2010 ditetapkan sebagai tahun dasar baru dalam penghitungan PDB/PDRB baik tingkat provinsi maupun kabupaten dengan beberapa perubahan cakupan dalam penghitungannya. Penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 berpedoman pada *System of National Account (SNA) 2008*.

Untuk membandingkan keadaan ekonomi suatu kabupaten/kota dengan keadaan ekonomi provinsi pada suatu tahun digunakan analisa empat kuadran. Dalam analisa ini sumbu X merupakan pertumbuhan ekonomi dan sumbu Y merupakan pendapatan perkapita PDRB provinsi. Mengadopsi istilah matematika, dimana pendapatan perkapita suatu kabupaten merupakan ordinat dan pertumbuhan ekonomi suatu kabupaten merupakan absis yang menentukan di mana letak/posisi suatu kabupaten dalam analisa empat kuadran tersebut. Dengan demikian dapat dilihat posisi masing-masing kabupaten/kota pada suatu tahun.

Apabila disajikan secara bersamaan maka terlihat perbandingan posisi suatu kebupaten dengan kabupaten lainnya. Di samping posisi kabupaten/kota yang diamati setiap tahunnya, disajikan pula paparan bagaimana keadaan perkembangan ekonomi suatu kabupaten/kota dari tahun ke tahun, dengan menggunakan analisa empat kuadran.

Secara deskriptif dapat diuraikan pula kondisi kategorial PDRB setiap kabupaten/kota dari tahun ke tahun, baik antar kabupaten/kota maupun perbandingannya dengan perkembangan ekonomi provinsi. Klasifikasi kategorial yang digunakan adalah klasifikasi yang direkomendasikan oleh PBB (UN) sehingga memungkinkan untuk diperbandingkan dengan wilayah lain baik nasional maupun internasional.

2.1 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *System of National Accounts* (SNA) 2008 melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Table* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan. Secara sistematis PDRB kabupaten/kota juga harus mengikuti aturan ini.

2.1.1 Pengertian SNA 2008

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur item tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

2.1.2 Manfaat Perubahan Tahun Dasar

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain:

- a. Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi.
- b. Meningkatkan kualitas data PDRB.
- c. Data PDRB bisa diperbandingkan secara internasional.

2.1.3 Implikasi Perubahan Tahun Dasar

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan mengubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

2.2 Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup subkategori tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, kehutanan dan penebangan kayu, dan perikanan. Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Di samping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources* (CBR). Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work in Progress* (WIP). Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP ditambah dengan nilai pelengkapnya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara. Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

2.3 Kategori Pertambangan dan Penggalian

Kategori ini merupakan salah satu kategori yang penting dalam perekonomian, dan mencakup kegiatan pertambangan minyak, gas dan panas bumi, pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya. Metode penghitungan NTB kategori pertambangan dan penggalian menggunakan metode pendekatan produksi.

2.4 Kategori Industri Pengolahan

Kategori industri pengolahan adalah kategori industri manufaktur yang mencakup seluruh kegiatan pengolahan baik barang organik maupun non organik dari bentuk yang sederhana menjadi produksi baru yang lebih tinggi nilainya. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian, serta produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan, atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan.

Kegiatan pengolahan ini dapat dilakukan secara mekanis maupun kimiawi, tanpa menggunakan alat-alat ataupun dengan bantuan alat-alat, baik dengan teknologi sederhana maupun teknologi tinggi. Industri pengolahan ini baik melibatkan mesin modern maupun mesin yang masih manual.

Kategori industri pengolahan dirinci menjadi subkategori industri migas dan non migas. Menurut jumlah tenaga kerjanya, kategori industri dikelompokkan atas industri besar/sedang, kecil serta rumah tangga. Penghitungan nilai tambah industri besar/sedang dengan pendekatan produksi dan pengumpulan datanya dilakukan secara menyeluruh/sensus. Sementara untuk industri kecil serta rumah tangga, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan produksi tetapi pencacahannya secara sampel.

2.5 Kategori Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini merupakan kategori penunjang seluruh kegiatan ekonomi. Kategori pengadaan listrik dan gas dianggap sebagai infrastruktur yang mendorong aktivitas proses produksi kategorial maupun kebutuhan masyarakat. Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen.

Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

2.6 Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan nilai tambah bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun.

2.7 Kategori Konstruksi

Kategori konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: konstruksi gedung tempat tinggal; konstruksi gedung bukan tempat tinggal. Konstruksi bangunan sipil, misalnya jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya. Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi, pembangkit tenaga listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya. Instalasi gedung dan bangunan sipil, instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya. Pengerukan meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya. Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung. Penyelesaian konstruksi meliputi pengecatan misalnya pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir, pengerjaan eksterior dan pertamaman pada gedung dan bangunan sipil lainnya. Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan output harga berlaku adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan output harga konstan, output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) konstruksi sebagai deflator.

2.8 Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Kegiatan pendistribusian/penyaluran dapat melalui pedagang besar dan pedagang eceran. Barang-barang yang diperdagangkan meliputi produk yang dihasilkan kategori pertanian, pertambangan dan penggalian, serta kategori industri baik yang berasal dari produksi dalam daerah, dari daerah lain, ataupun dari luar negeri.

2.9 Kategori Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup seluruh penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori transportasi dan pergudangan terdiri atas : angkutan rel, angkutan darat, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti : terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

2.10 Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyediaan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

Subkategori hotel mencakup kegiatan penyediaan akomodasi dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan, beserta fasilitas-fasilitas lain yang menunjang seperti binatu, restoran, diskotek, tempat olah raga, penyewaan ruangan dan sebagainya. Jenis kegiatan perhotelan yang dicakup meliputi hotel, losmen, wisma, dan sejenisnya.

Subkategori restoran mencakup kegiatan penyediaan makanan dan minuman jadi yang langsung dikonsumsi/dihidangkan di tempat penjualan, baik dengan tempat tetap maupun tidak tetap/berpindah-pindah. Kegiatan tersebut meliputi usaha tata boga, warung, restoran, kedai, kantin, bakso keliling, dan sejenisnya.

2.11 Kategori Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu penerbitan, produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik, penyiaran dan pemograman (radio dan televisi), telekomunikasi, pemograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti *Compact Disc Read Only Memory/CD ROM* buku referensi, dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, *video tape* atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti *editing, cutting, dubbing* film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain.

Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan isi siaran atau perolehan hak untuk menyalirkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

2.12 Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dana pensiun, jasa keuangan lainnya, serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Output atas dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan imputasi jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output untuk subkategori Asuransi atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil *underwriting*, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Jasa keuangan lainnya meliputi mencakup kegiatan leasing, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

2.13 Kategori Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah property berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun

2.14 Kategori Jasa Perusahaan

Kategori jasa perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna.

Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Kegiatan subkategori jasa perusahaan pada umumnya melayani kebutuhan perusahaan dan bersifat komersial. Seperti pada umumnya, penghitungan nilai tambah brutonya menggunakan pendekatan produksi.

2.15 Kategori Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib.

Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini, meskipun dilakukan oleh badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistem sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Sedangkan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

2.16 Kategori Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB jasa pendidikan pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk jasa pendidikan swasta menggunakan pendekatan pendekatan produksi. Untuk NTB jasa pendidikan pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa pendidikan swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

2.17 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: jasa rumah sakit, jasa klinik, jasa rumah sakit lainnya, praktik dokter, jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, jasa pelayanan kesehatan tradisional, jasa pelayanan penunjang kesehatan, jasa angkutan khusus pengangkutan orang sakit (*Medical Evacuation*), jasa kesehatan hewan, dan jasa kegiatan sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

2.18 Kategori Jasa Lainnya

Kategori jasa lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: kesenian, hiburan, dan rekreasi; jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi serta perlengkapan rumah tangga; jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan; jasa swasta lainnya termasuk kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, badan regional, *IMF*, *OECD*, dan lain-lain.

Bab 3

Analisis Empat

Kuadran

Analisis empat kuadran biasa disebut sebagai Tipologi Klassen. Analisis ini digunakan untuk melihat posisi suatu kabupaten/kota terhadap provinsi ditinjau dari aspek PDRB perkapita sekaligus pertumbuhan ekonominya. Analisis ini dapat membantu pemetaan wilayah andalan yang berorientasi pada sektor (Pesurnay, 2018).



BAB 3 ANALISIS EMPAT KUADRAN

Analisis empat kuadran biasa disebut sebagai Tipologi Klassen. Analisis ini digunakan untuk melihat posisi suatu kabupaten/kota terhadap provinsi ditinjau dari aspek PDRB perkapita sekaligus pertumbuhan ekonominya. Analisis ini dapat membantu pemetaan wilayah andalan yang berorientasi pada sektor (Pesurnay, 2018).

Bidang analisis yang digunakan dibagi atas empat bidang. PDRB perkapita provinsi digambarkan sebagai ordinat dan pertumbuhan ekonomi provinsi merupakan garis absis. Maka posisi daerah akan terpetakan dalam ke empat kuadran yang terbentuk (Sarnowo, 2016). Keempat kuadran itu adalah :

- ▶ Kuadran pertama (I) merupakan kuadran yang mempunyai PDRB perkapita serta pertumbuhan ekonomi di atas provinsi (diwakili oleh jumlah PDRB dari seluruh kabupaten/kota). Daerah yang terletak pada posisi ini disebut sebagai "daerah maju dan cepat tumbuh".
- ▶ Kuadran kedua (II) adalah merupakan posisi daerah yang PDRB perkapitanya di atas provinsi tetapi pertumbuhan ekonominya di bawah provinsi. Daerah pada posisi ini disebut sebagai "daerah berkembang cepat".
- ▶ Kuadran ketiga (III) adalah tempat kumpulan posisi daerah yang mempunyai PDRB perkapita serta laju pertumbuhan ekonominya di bawah provinsi. Mereka yang terletak pada posisi ini disebut sebagai "daerah relatif tertinggal".
- ▶ Kuadran keempat (IV) merupakan posisi daerah yang PDRB perkapitanya di bawah provinsi tetapi pertumbuhan ekonominya di atas provinsi. Istilah untuk daerah pada posisi ini adalah "daerah maju tapi tertekan".

Berdasarkan PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomi dari masing-masing kabupaten/kota dapat ditentukan letaknya pada suatu kuadran. Posisi yang paling ideal untuk suatu daerah adalah posisi pada kuadran pertama, sedangkan yang paling tidak diinginkan adalah posisi pada kuadran ketiga (III).

Pada kuadran dua dapat dibayangkan bahwa PDRB perkapita yang dicapai lebih baik dari provinsi, tetapi pertumbuhannya masih di bawah rata-rata. Demikian juga pada kuadran empat, walaupun pertumbuhannya sudah di atas provinsi, tetapi PDRB perkapitanya di bawah provinsi. Situasi peta dalam tipologi ini tidak dapat dihindari, karena tidak mungkin seluruh PDRB perkapita ataupun pertumbuhan ekonomi dari kabupaten/kota seluruhnya di atas provinsi, harus ada yang di atas provinsi ataupun di bawah provinsi.

Tabel 3.1 menunjukkan posisi tersebut dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dari tahun ke tahun posisi antar daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2019 ada 4(empat) kabupaten/kota yang berada pada kuadran I dan II, sedangkan yang terletak pada kuadran III ada 4 (empat), sisanya 3 (tiga) kabupaten berada pada kuadran IV. Tahun 2020 Kabupaten Muaro Jambi berpindah ke kuadran I, dianggap daerah maju dan mampu tumbuh. Sementara Kabupaten Batanghari berpindah ke kuadran IV. Sama halnya dengan Kerinci, Merangin, Sarolangun dan Bungo bergeser ke kuadran IV. Tahun berikutnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Sungai Penuh berpindah ke kuadran II. Kerinci, Merangin, Sarolangun dan Batanghari berpindah ke kondisi seperti tahun 2018. Pada tahun 2021, ketika pemulihan ekonomi dimulai, pergeseran kuadran terjadi di Kota Jambi, beralih menjadi kuadran IV. Kondisi perekonomian tahun 2022 merubah pergeseran kuadran Kabupaten Kerinci, Batanghari, dan Bungo. Tahun 2023, pergeseran terjadi di Kabupaten Sarolangun, Batanghari, Tebo dan Kota Jambi. Tahun 2024, hanya Kabupaten Bungo yang mengalami pergeseran dari kuadran IV ke kuadran III.

Tabel 3.1
Letak Kuadran Kabupaten/Kota, 2020–2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kerinci	IV	IV	III	IV	IV
2. Merangin	IV	IV	IV	IV	IV
3. Sarolangun	IV	IV	IV	III	III
4. Batang Hari	IV	IV	I	II	III
5. Muaro Jambi	I	I	I	I	I
6. Tanjung Jabung Timur	II	II	II	II	I
7. Tanjung Jabung Barat	I	II	II	II	II
8. Tebo	IV	IV	IV	III	III
9. Bungo	IV	IV	III	IV	III
10. Kota Jambi	III	IV	IV	IV	IV
11. Kota Sungai Penuh	I	II	II	I	I

Catatan: *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Pertumbuhan ekonomi dan kenaikan PDRB perkapita Provinsi merupakan rangkuman dari seluruh kabupaten/kota yang ada. Sehingga pergeseran letak pertumbuhan ekonomi maupun PDRB perkapita dari di atas provinsi menjadi di bawah provinsi bukan berarti pertumbuhan ekonomi atau PDRB perkapitanya negatif melainkan tidak selalu pertumbuhan kabupaten/kota yang lain.

Bab 4

Analisis Sektoral

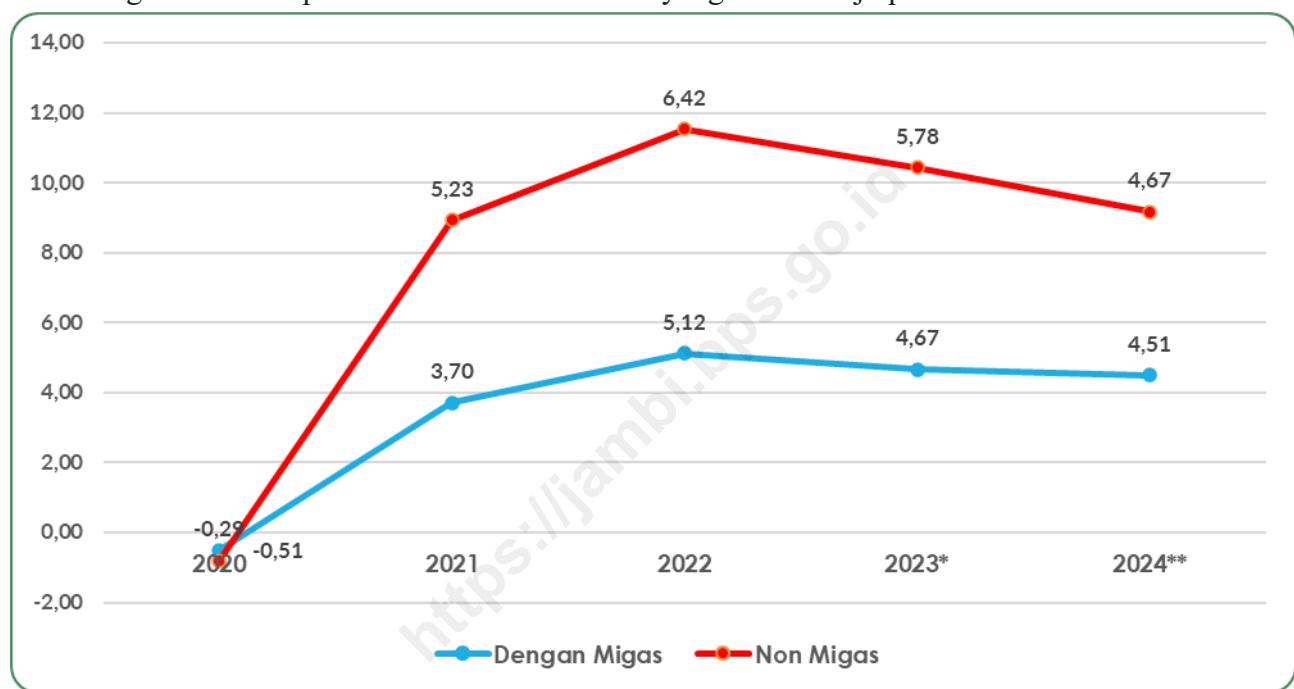
Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan kategori-kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor menggambarkan kemampuan suatu daerah dan upaya untuk memberdayakan setiap kategori agar dapat berproduksi.



BAB 4 ANALISIS SEKTORAL

Perekonomian di setiap kabupaten/kota tumbuh karena berbagai macam kegiatan ekonomi yang timbul di daerah tersebut. Untuk mempermudah pengamatan kegiatan perekonomian di suatu wilayah maka kegiatan ekonomi tersebut dikelompokkan dalam 17 kategori/lapangan usaha. Pengelompokan tersebut menggambarkan sektor-sektor ekonomi yang menentukan dan berpengaruh dalam kehidupan ekonomi.

Perkembangan perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu juga dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara y-to-y dan dapat diamati menurut sektor. Dari PDRB atas dasar harga konstan dapat ditarik sebuah indikator yang disebut laju pertumbuhan ekonomi.



Catatan: *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Gambar 4.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (persen), 2020–2024

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi (dengan migas) berturut-turut sejak tahun 2020–2024 adalah -0,51 persen, 3,70 persen, 5,12 persen, 4,67 persen dan 4,51 persen. Gambaran keadaan ekonomi Provinsi Jambi ini adalah merupakan rekapan semua perubahan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten dan kota, sehingga semua perubahan di kabupaten/kota secara aggregatif menggambarkan perubahan yang terjadi di Provinsi Jambi.

4.1 PDRB Kabupaten/Kota

PDRB merupakan ukuran dari nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu region. Data PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimiliki melalui suatu proses produksi. Oleh karena itu besaran dan struktur PDRB sangat tergantung kepada sumber daya alam dan faktor produksinya. Adanya keterbatasan dalam penyediaan dan kemampuan memberdayakan faktor-faktor tersebut menyebabkan struktur PDRB kabupaten/kota bervariasi antar daerah.

Tabel 4.1 menyajikan posisi PDRB kabupaten/kota atas dasar harga berlaku dengan migas. Tahun 2020, komposisi PDRB kabupaten/kota hampir mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan andil terbesar dalam penciptaan PDRB Provinsi Jambi. Kota Jambi menduduki urutan kedua, diikuti oleh Kabupaten Muaro Jambi. Pada tahun 2021, peringkat masih sama dengan tahun sebelumnya. Disusul Kabupaten Bungo, Batang Hari, Merangin, Tebo, Sarolangun, Kerinci, dan terakhir Kota Sungai Penuh.

Kondisi perekonomian pada tahun 2022 yang mengalami kontraksi mengakibatkan pertukaran posisi Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tebo, namun kontribusi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi, dan Muaro Jambi masih berada di posisi tiga besar dengan *share* semakin membesar ketika masa pemulihan ekonomi. Pada tahun 2023, kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi mengalami perubahan peringkat pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Batanghari. Menurunnya produksi dan harga migas di pasar global berdampak pada menurunnya peringkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebaliknya, produksi batubara di Kabupaten Batanghari mengalami peningkatan yang cukup tinggi, seiring dengan kenaikan harga batubara sehingga peringkat Kabupaten Batanghari naik 1 (satu) tingkat ke peringkat 5 (lima) menggeser Kabupaten Bungo yang juga menggeser Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke peringkat 6 (enam). Tahun 2024, urutan tiga besar masih diduduki oleh Kabupaten tanjung Jabung Barat, Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Menurunnya kuota batubara di Kabupaten Batang Hari menyebabkan pertukaran posisi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana di 2024 produksi migas meningkat cukup besar.

Tabel 4.1

Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas terhadap Total PDRB (persen), 2020–2024

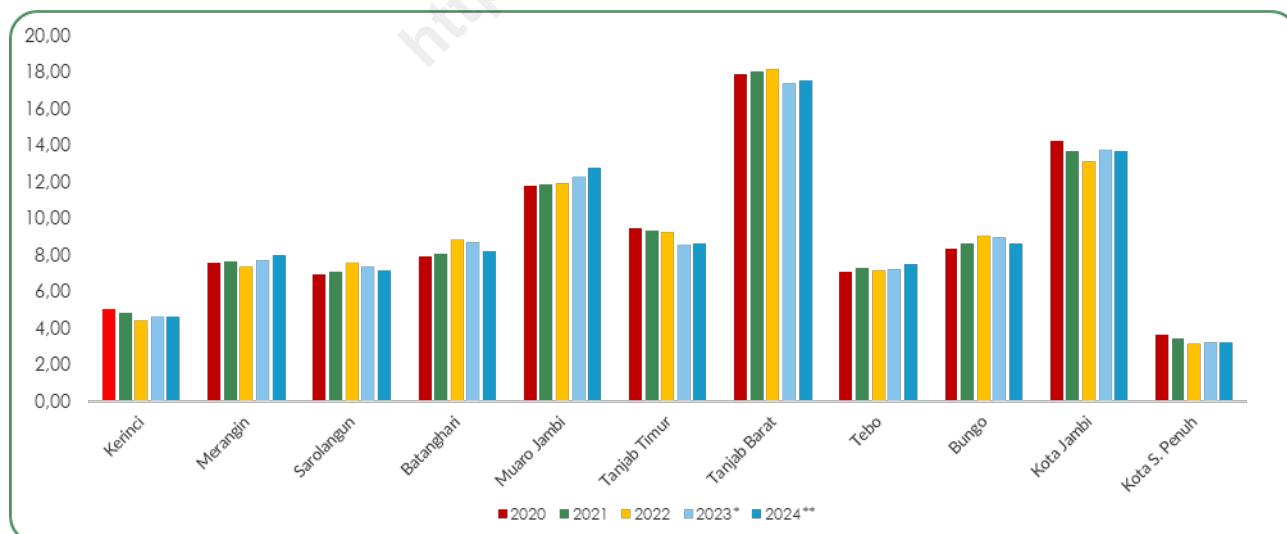
Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kerinci	5,05	4,83	4,43	4,59	4,64
2. Merangin	7,57	7,66	7,36	7,72	8,02
3. Sarolangun	6,97	7,11	7,55	7,37	7,15
4. Batang Hari	7,92	8,08	8,81	8,72	8,24
5. Muaro Jambi	11,77	11,84	11,95	12,30	12,75
6. Tanjung Jabung Timur	9,45	9,36	9,29	8,59	8,60
7. Tanjung Jabung Barat	17,93	18,08	18,16	17,43	17,56
8. Tebo	7,12	7,28	7,14	7,25	7,53
9. Bungo	8,36	8,63	9,03	9,01	8,62
10. Kota Jambi	14,23	13,71	13,12	13,76	13,66
11. Kota Sungai Penuh	3,65	3,43	3,15	3,25	3,24
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Jika dilihat menurut kategori, kontribusi terbesar diciptakan oleh kategori pertambangan dan penggalian terutama subkategori pertambangan migas yang menjadi unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tiga kabupaten penyumbang PDRB terbesar lainnya adalah Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Bungo.



Catatan: *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Gambar 4.2

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku terhadap Total PDRB (Dengan Migas), 2020–2024

Tabel 4.2

Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku terhadap Total PDRB (persen), 2020–2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kerinci	5,78	5,55	5,17	5,19	5,22
2. Merangin	8,65	8,82	8,58	8,72	9,03
3. Sarolangun	7,43	7,54	8,03	7,74	7,47
4. Batang Hari	8,89	9,12	10,08	9,72	9,14
5. Muaro Jambi	12,72	12,85	13,03	13,14	13,62
6. Tanjung Jabung Timur	6,20	5,93	5,52	5,62	5,65
7. Tanjung Jabung Barat	12,59	12,63	12,31	12,68	13,06
8. Tebo	7,93	8,15	8,05	7,98	8,26
9. Bungo	9,56	9,93	10,53	10,17	9,70
10. Kota Jambi	16,08	15,55	15,03	15,36	15,20
11. Kota Sungai Penuh	4,18	3,94	3,67	3,67	3,65
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Peringkat PDRB Kabupaten/Kota tanpa migas pada tahun 2020 sampai 2024 tidak mengalami perubahan. Kota Jambi memberikan kontribusi tertinggi pada tahun 2024 (15,20 persen), kemudian disusul Kabupaten Muaro Jambi (13,62 persen), Kabupaten Tanjung Jabung Barat (13,06 persen), dan terendah Kota Sungai Penuh (3,65 persen).

4.2 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan kategori-kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor menggambarkan kemampuan suatu daerah dan upaya untuk memberdayakan setiap kategori agar dapat berproduksi. Berikut ini gambaran struktur perekonomian kabupaten/kota yang disajikan dalam bentuk PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024.

4.2.1 Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2024

Pada tahun 2024 kategori pertanian masih menjadi primadona utama PDRB Provinsi Jambi. Ada 8 (delapan) kabupaten/kota dengan peranan kategori pertanian tertinggi dibandingkan dengan kategori-kategori lain, yaitu Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tebo, dan Bungo. Hal ini sesuai dengan gambaran keadaan perekonomian Provinsi Jambi.

Terdapat 4 (empat) kategori penyumbang PDRB terbesar di tahun 2024, yaitu kategori pertanian, pertambangan, industri pengolahan dan perdagangan. Untuk kategori pertanian, ada 2(dua) kabupaten/kota di Provinsi Jambi memiliki peranan lebih dari 50 persen (Tabel 4.3) yaitu Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tebo yang didukung oleh hasil perkebunan karet, kelapa sawit dan kopi. Sementara Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh merupakan daerah dengan peranan kategori pertanian di bawah 5 persen yaitu masing-masing sebesar 0,84 persen dan 4,69 persen pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh sempitnya lahan pertanian yang mengakibatkan rendahnya produksi pertanian. Peranan kategori pertanian di daerah perkotaan, lebih kecil dibandingkan peranan selain pertanian.

Untuk kategori pertambangan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan 2 (dua) kabupaten dengan kontribusi cukup besar. Produksi minyak bumi, dan gas yang melimpah menjadikan kedua kabupaten memiliki kontribusi kategori pertambangan dan penggalian cukup besar dalam pembentukan PDRB masing-masing kabupaten (lebih dari 25 persen).

Untuk kategori industri pengolahan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyumbang PDRB terbesar. Hal ini disebabkan oleh *share* beberapa industri di Tanjung Jabung Barat yaitu industri pengilangan migas, industri kertas dan industri makanan. Industri pengilangan migas yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghasilkan produksi terbesar dibanding dua kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada urutan selanjutnya pada kategori industri pengolahan adalah Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Untuk Kabupaten Muaro Jambi, dipengaruhi oleh banyaknya industri makanan dan minuman khususnya industri pengolahan kelapa sawit, sedangkan Kota Jambi industri makanan dan minuman serta industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya mendominasi kategori industri.

Penyumbang terbesar di kategori perdagangan di Provinsi Jambi, yaitu Kota Jambi, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Bungo. Hal ini disebabkan oleh posisi Kota Jambi sebagai ibukota provinsi, sedangkan untuk Kabupaten Bungo karena terdapat di jalur lintas pulau Sumatera dari Kabupaten Tebo, Merangin ke Kabupaten Dharmasraya yang masuk wilayah Provinsi Sumatra Barat. Kategori perdagangan mencakup kegiatan pendistribusian produk dalam bentuk barang yang berasal dari produksi daerah maupun dari daerah lain. Barang yang dimaksud merupakan impor yang berasal dari daerah lain maupun dari luar negeri.

Barang yang berasal dari daerah lain ini digunakan sebagai bahan baku untuk kategori industri atau untuk konsumsi akhir. Dengan demikian berkembangnya subkategori perdagangan ini sangat dipengaruhi oleh volume barang yang diperdagangkan baik yang diproduksi di daerah tersebut maupun yang berasal dari luar.

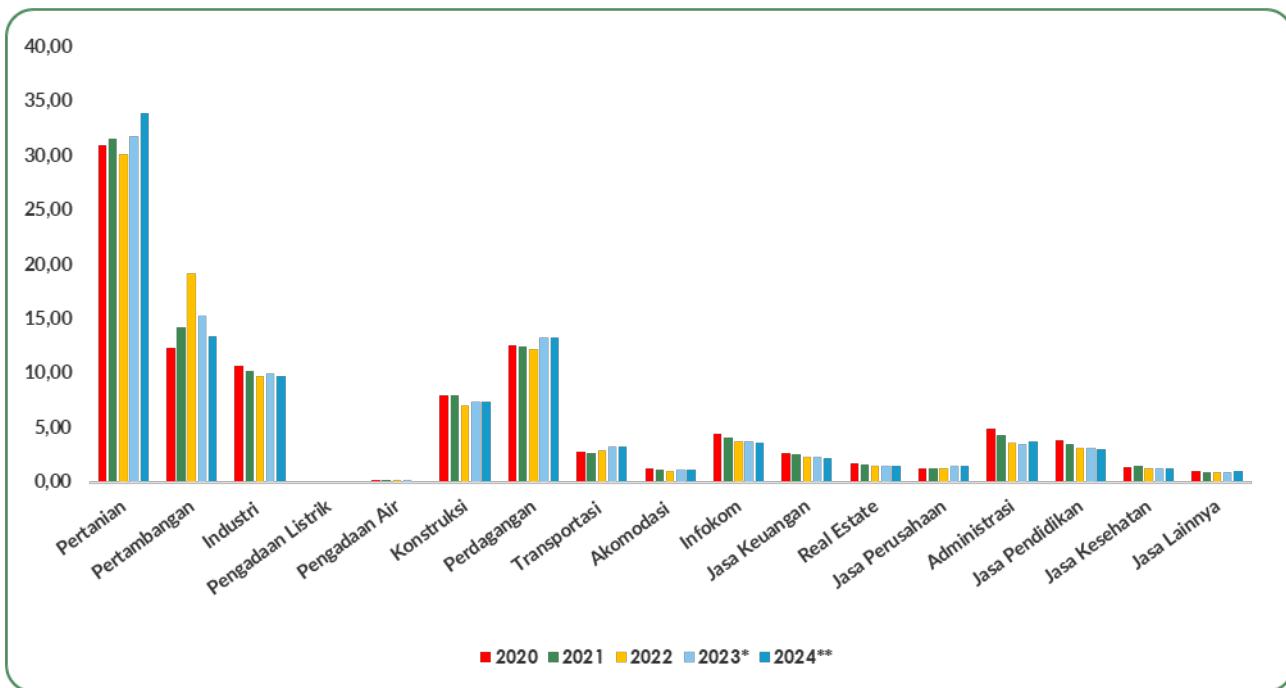
Tabel 4.3

Struktur Perekonomian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten/Kota (persen), 2024**

Kategori	Kabupaten/Kota										
	Kerinci	Merangin	Sarolangun	Batang Hari	Muaro Jambi	Tanjung Jabung Timur	Tanjung Jabung Barat	Tebo	Bungo	Kota Jambi	Kota Sungai Penuh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Pertanian	48,84	52,65	31,79	43,25	47,16	24,16	34,57	56,73	27,13	0,84	4,69
2. Pertambangan	1,74	2,17	21,14	13,16	9,67	36,04	25,92	4,95	13,90	1,20	0,79
3. Industri Pengolahan	2,76	7,52	3,89	10,06	13,81	8,05	17,54	6,11	6,47	10,48	0,62
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,07	0,04	0,06	0,05	0,03	0,03	0,09	0,06	0,25	0,03
5. Pengadaan Air	0,27	0,15	0,12	0,06	0,08	0,07	0,07	0,04	0,18	0,25	0,23
6. Konstruksi	11,96	5,51	12,26	5,22	7,28	6,02	5,22	5,59	10,84	8,43	10,18
7. Perdagangan	10,31	12,88	9,37	9,51	5,86	10,11	4,89	10,81	15,79	34,01	31,57
8. Transportasi dan Pergudangan	1,99	1,70	2,10	1,65	2,97	1,65	0,94	1,31	2,51	11,11	4,14
9. Penyediaan Akomodasi	0,67	1,72	1,86	0,34	0,52	0,44	0,53	0,29	2,53	2,63	1,14
10. Informasi dan Komunikasi	7,10	3,67	3,39	3,57	2,24	2,02	2,16	3,38	4,84	4,42	13,48
11. Jasa Keuangan	0,91	1,17	2,41	1,45	1,43	0,95	1,08	1,09	3,65	5,33	4,73
12. Real Estate	1,47	1,74	1,19	1,05	1,17	0,75	0,77	1,59	2,34	2,36	2,56
13. Jasa Perusahaan	0,05	0,14	0,33	0,09	1,27	2,06	1,61	0,07	0,26	4,36	6,17
14. Administrasi	5,37	3,44	4,90	4,09	2,59	2,56	1,69	3,67	3,89	7,10	5,66
15. Jasa Pendidikan	3,71	2,99	2,46	4,04	1,64	3,98	1,85	2,00	4,35	4,01	9,22
16. Jasa Kesehatan	1,51	1,38	1,45	1,51	0,99	0,73	0,58	0,92	0,71	2,51	2,55
17. Jasa Lainnya	1,31	1,10	1,29	0,88	1,25	0,38	0,56	1,34	0,56	0,72	2,25
PDRB Dengan Migas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB Tanpa Migas	100,00	100,00	92,74	98,55	94,88	58,37	66,09	97,46	100,00	98,85	100,00

Catatan: **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi



Catatan: *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Gambar 4.3

Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Menurut Kategori di Provinsi Jambi (Dengan Migas), 2020–2024

Untuk kategori konstruksi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, dan Kota Sungai Penuh memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pembentukan PDRB kabupaten/kota. Kontribusi tersebut masing-masing sebesar 12,26 persen; 11,96 persen; 10,84 persen dan 10,18 persen (Tabel 4.3).

Sedangkan dalam kategori transportasi dan perdagangan, Kota Jambi merupakan penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 11,11 persen. Sebagai ibukota provinsi, Kota Jambi memiliki akses transportasi ke luar provinsi seperti Riau dan Sumatra Selatan. Begitu juga dengan angkutan udara, memiliki rute penerbangan yang lebih banyak, baik ke pusat ibukota negara maupun ke kota besar lainnya di Indonesia. Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya kategori transportasi dan perdagangan, sumbangannya terhadap pembentukan PDRB kabupaten/kota sangat kecil, berkisar di bawah 5 persen.

4.2.2 Perbandingan Peranan Kategori Ekonomi Tahun 2020–2024

Struktur perekonomian kabupaten/kota pada umumnya dari tahun ke tahun tidak banyak mengalami perubahan. Namun demikian, pergeseran peranan antar kategori ekonomi kemungkinan baru akan terjadi setelah tenggang waktu tertentu. Berubahnya peranan suatu kategori tertentu dapat mempengaruhi peranan kategori-kategori yang lain. Perubahan tersebut menggambarkan kemampuan kabupaten/kota dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Berikut ini akan disajikan perbandingan peranan beberapa kategori ekonomi mulai tahun 2020 sampai 2024.

1. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori pertanian masih memegang peranan terpenting dan merupakan sektor utama dalam pembentukan perekonomian daerah di Provinsi Jambi. Sumbangan kategori pertanian terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jambi masih mendominasi. Dari tahun 2020–2024, kategori pertanian merupakan penyumbang cukup besar terhadap perekonomian Provinsi Jambi terkecuali untuk Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh.

Tabel 4.4

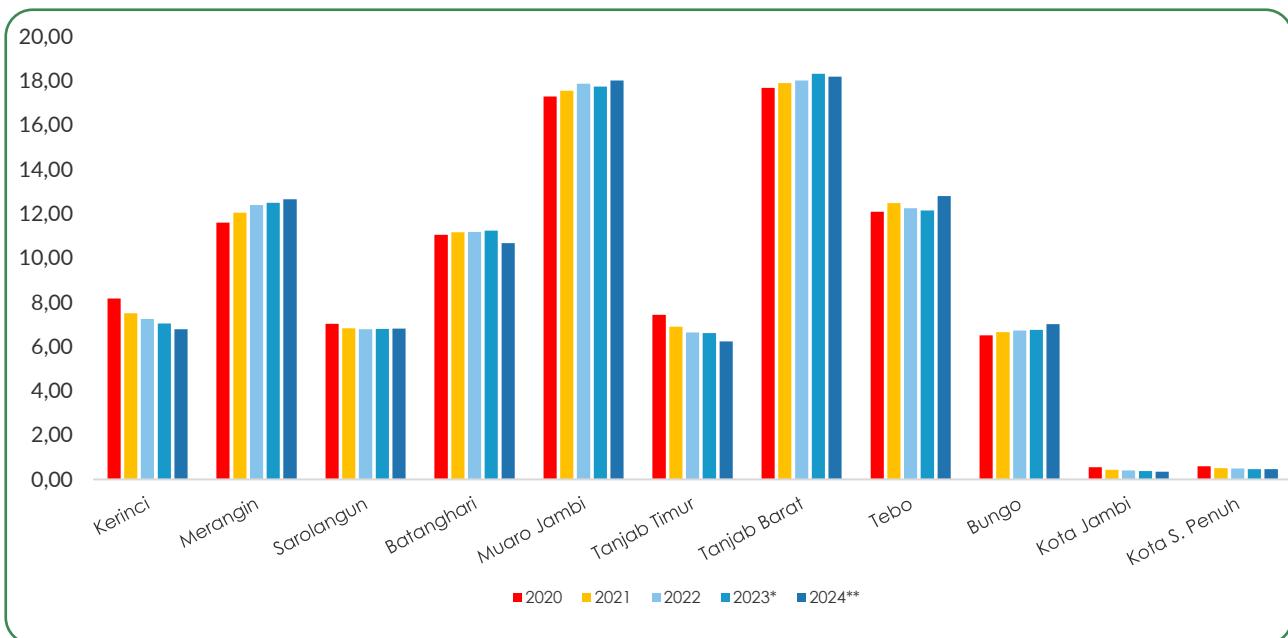
**Peranan Kategori Pertanian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (persen),
2020–2024**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kerinci	8,16	7,51	7,24	7,04	6,79
2. Merangin	11,61	12,05	12,39	12,50	12,66
3. Sarolangun	7,02	6,82	6,79	6,79	6,81
4. Batang Hari	11,05	11,16	11,18	11,24	10,68
5. Muaro Jambi	17,30	17,56	17,88	17,74	18,02
6. Tanjung Jabung Timur	7,44	6,90	6,64	6,61	6,23
7. Tanjung Jabung Barat	17,69	17,91	18,02	18,33	18,19
8. Tebo	12,08	12,48	12,25	12,15	12,81
9. Bungo	6,50	6,66	6,72	6,76	7,01
10. Kota Jambi	0,54	0,43	0,40	0,38	0,34
11. Kota Sungai Penuh	0,60	0,51	0,49	0,47	0,46
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi



Catatan: *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Gambar 4.4

Pergeseran Peranan Kategori Pertanian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2020–2024

Bericara tentang kontribusi/penyumbang suatu kategori terhadap PDRB kabupaten/kota, memang tidak terlepas dari dua hal, yaitu produksi dan harga. Dari dua hal tersebut akan dihasilkan output dan selanjutnya dapat dihitung nilai tambah bruto. Oleh karena itu naik turunnya peranan suatu kategori sangat tergantung pada produksi dan harga baik komoditi kategori tersebut maupun kategori yang lain.

Perkembangan rata-rata harga pertanian khususnya tanaman perkebunan, pada tahun 2024 semakin membaik. Di tengah menggeliatnya perekonomian yang mulai pulih, harga kelapa sawit dan karet di tingkat internasional juga mendukung, kenaikannya merupakan berkah bagi petani Jambi. Perubahan harga tandan buah segar kelapa sawit yang terjadi pada tahun 2024 menjadi harga tertinggi selama 5 tahun terakhir. Berbeda halnya dengan harga kelapa sawit, harga karet masih belum bisa dikendalikan. Rendahnya harga menyebabkan petani enggan untuk menyadap hasil kebunnya.

2. Kategori Pertambangan dan Penggalian

Pada tahun 2024, kategori pertambangan dan penggalian masih menduduki peringkat kedua dalam memberikan peranan terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jambi. Pada tabel 4.5 peranan kategori pertambangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melebihi 20 persen. Sedangkan kabupaten lain, peranannya dibawah 9 persen.

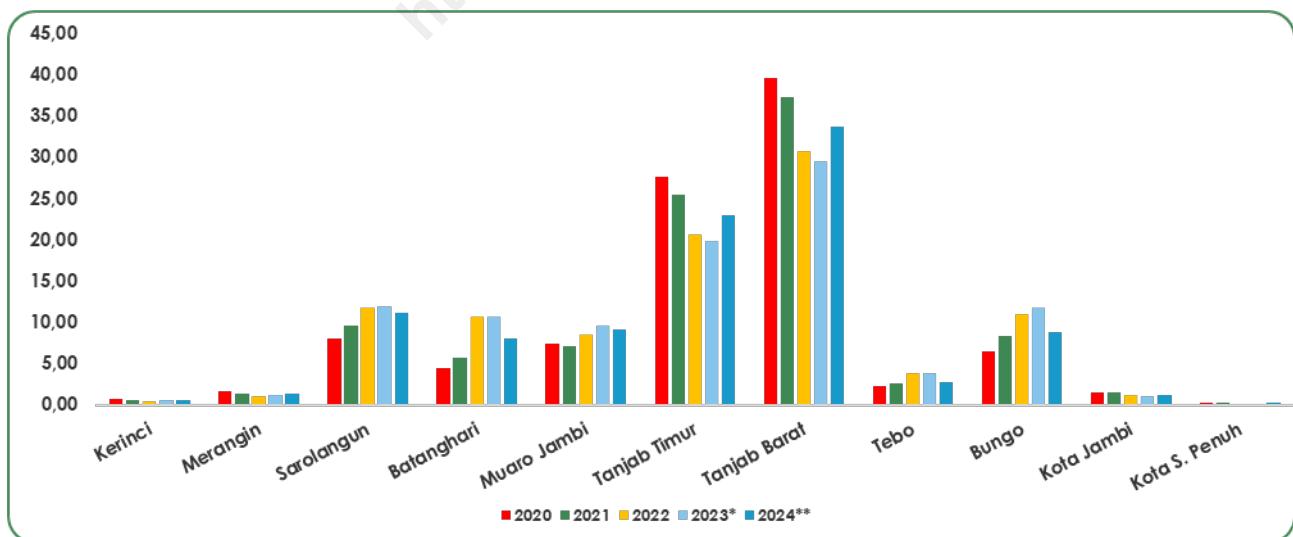
Tabel 4.5
Peranan Kategori Pertambangan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jambi (persen), 2020–2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kerinci	0,70	0,60	0,41	0,51	0,60
2. Merangin	1,61	1,37	0,99	1,12	1,29
3. Sarolangun	8,00	9,67	11,71	11,92	11,20
4. Batang Hari	4,44	5,79	10,72	10,71	8,03
5. Muaro Jambi	7,45	7,07	8,48	9,53	9,14
6. Tanjung Jabung Timur	27,63	25,56	20,60	19,82	22,97
7. Tanjung Jabung Barat	39,66	37,34	30,81	29,49	33,73
8. Tebo	2,29	2,59	3,87	3,85	2,77
9. Bungo	6,54	8,38	11,05	11,80	8,88
10. Kota Jambi	1,46	1,44	1,22	1,10	1,22
11. Kota Sungai Penuh	0,23	0,19	0,13	0,16	0,19
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi



Catatan: *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Gambar 4.5

Pergeseran Peranan Kategori Pertambangan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jambi, 2020–2024

3. Kategori Industri Pengolahan

Kategori industri pengolahan juga merupakan kategori yang dominan peranannya dalam perekonomian di sebagian daerah Provinsi Jambi. Besarnya peranan kategori ini menggambarkan kemampuan daerah melakukan proses pengolahan barang mentah menjadi barang jadi agar mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi. Sedangkan perkembangannya antara lain ditentukan oleh tersedianya bahan baku, mesin industri, dan tenaga kerja yang berasal dari daerah setempat atau daerah lain.

Tabel 4.6
Peranan Kategori Industri Pengolahan
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (persen), 2020–2024

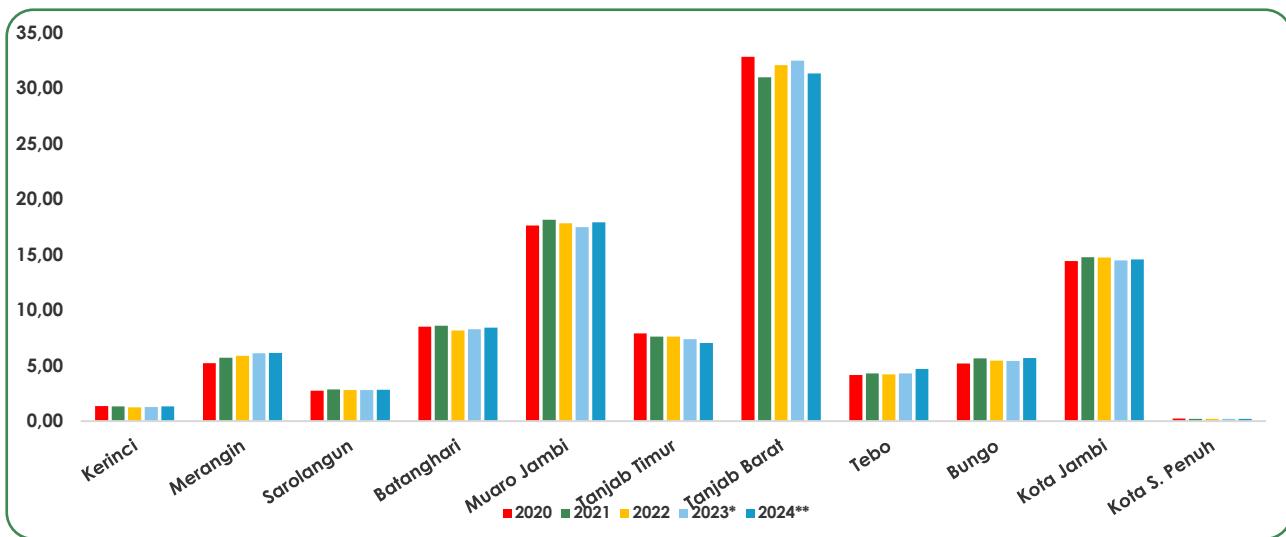
Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kerinci	1,34	1,31	1,22	1,26	1,30
2. Merangin	5,22	5,70	5,86	6,10	6,13
3. Sarolangun	2,72	2,85	2,78	2,79	2,82
4. Batang Hari	8,49	8,58	8,14	8,26	8,42
5. Muaro Jambi	17,61	18,14	17,81	17,45	17,90
6. Tanjung Jabung Timur	7,90	7,60	7,61	7,38	7,03
7. Tanjung Jabung Barat	32,80	30,94	32,04	32,44	31,30
8. Tebo	4,13	4,29	4,19	4,27	4,68
9. Bungo	5,19	5,63	5,43	5,40	5,66
10. Kota Jambi	14,40	14,76	14,72	14,46	14,55
11. Kota Sungai Penuh	0,21	0,20	0,19	0,19	0,20
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa pada tahun 2024, peranan kategori industri pengolahan di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami kenaikan. Peningkatan terbesar terjadi di Kabupaten Tebo, yang meningkat dari 4,27 persen menjadi 4,68 persen. Urutan kedua adalah Kota Sungai Penuh yang meningkat dari 0,19 persen menjadi 0,20 persen. Penurunan peranan terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peranan Industri pengolahan di kedua kabupaten tersebut masing-masing menurun dari 21,44 persen menjadi 31,30 persen dan 7,38 persen turun menjadi 7,03 persen.



Catatan: *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Gambar 4.6

Pergeseran Peranan Kategori Industri Pengolahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2020–2024

4. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini berperan sebagai penunjang kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Di Provinsi Jambi keadaan perekonomian di samping dipengaruhi oleh kategori pertanian sebagai sektor utama, juga dipengaruhi oleh peranan kategori lain yaitu sektor perdagangan (Tabel 4.7). Kategori ini juga mencakup perdagangan motor dan mobil serta reparasinya.

Kategori perdagangan besar dan eceran sangat tergantung kepada kategori pertanian, pertambangan dan industri pengolahan di samping impor, baik impor dari luar negeri maupun antar provinsi. Artinya secara umum, makin tinggi kegiatan ekonomi, akan makin besar nilai tambah bruto pada kategori perdagangan. Kalau perkembangannya lebih besar dari kategori yang lain maka akan naik pula peranan kategori perdagangan tersebut.

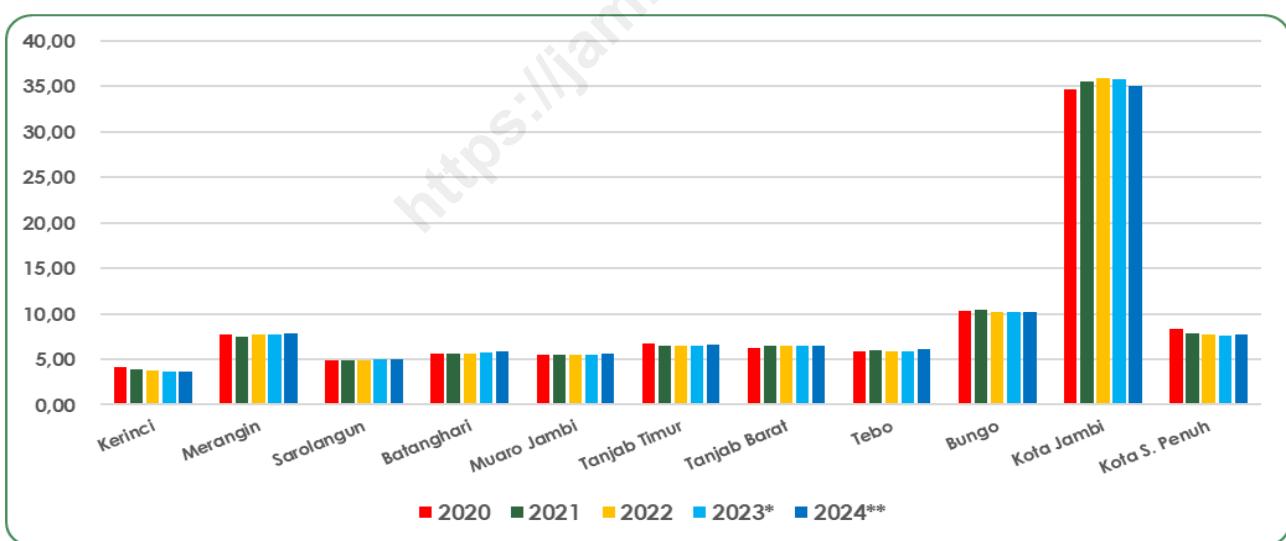
Tabel 4.7
Peranan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (persen), 2020–2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kerinci	4,08	3,84	3,71	3,59	3,60
2. Merangin	7,66	7,50	7,70	7,77	7,78
3. Sarolangun	4,93	4,89	4,90	5,01	5,04
4. Batang Hari	5,67	5,66	5,68	5,74	5,89
5. Muaro Jambi	5,50	5,44	5,50	5,55	5,63
6. Tanjung Jabung Timur	6,73	6,44	6,47	6,45	6,55
7. Tanjung Jabung Barat	6,29	6,45	6,45	6,49	6,46
8. Tebo	5,88	5,96	5,83	5,87	6,13
9. Bungo	10,33	10,41	10,13	10,16	10,24
10. Kota Jambi	34,62	35,54	35,88	35,75	34,98
11. Kota Sungai Penuh	8,32	7,87	7,75	7,64	7,70
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi



Catatan: *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Gambar 4.7
Pergeseran Peranan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2020–2024

4.3 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

Untuk melihat gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dapat digunakan indikator PDRB. Indikator tersebut diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Dengan demikian angka PDRB perkapita ini sangat dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut. Artinya apabila persentase pertambahan PDRB lebih besar dari persentase pertambahan penduduk maka PDRB perkapitanya akan semakin besar, begitu pula sebaliknya.

Walaupun demikian besar kecilnya PDRB perkapita yang akan dijadikan ukuran bagi tingkat kemakmuran/kesejahteraan suatu daerah tidak dapat digunakan langsung untuk pengambilan kesimpulan. Diperlukan pendamping atau dalam kata lain diiringi dengan indikator lainnya.

Dengan tersedianya data PDRB perkapita menurut kabupaten/kota dalam suatu kurun waktu yang relatif panjang akan membantu para pemakai data dalam melakukan perbandingan baik antar wilayah/daerah serta perbandingan antar sektor maupun antar tahun.

4.3.1 PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2024

PDRB perkapita seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Penghitungan PDRB perkapita tersebut berdasarkan penghitungan atas dasar harga berlaku.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, sederhana, dan sistematis dalam Tabel 4.8 disajikan PDRB perkapita dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2024. PDRB perkapita antara dengan migas dan non migas antar kabupaten/kota berbeda kecuali Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh. PDRB perkapita dengan migas tertinggi yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat diikuti Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun, PDRB perkapita tanpa migas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menduduki peringkat ke 9 (sembilan). Hal ini diakibatkan oleh dominannya sektor pertambangan migas dan pengilangan migas.

Tingginya PDRB perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak bisa serta merta menjadi acuan bahwa masyarakat disana mengalami kemakmuran. Seperti disebutkan pada pembahasan kategori pertambangan bahwa PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat 25,92 persen ditopang dari hasil pertambangan. Daerah yang hidup dari pertambangan, kekayaan sesungguhnya belum tentu bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Salah satu penyebab tidak makmurnya masyarakat setempat adalah biasanya masyarakat hanya sebagai buruh dengan pendapatan rendah dan pemilik perusahaan migas bukan penduduk setempat.

Tabel 4.8 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota, 2024**

Kabupaten/Kota	PDRB Per Kapita	
	Dengan Migas	Tanpa Migas
(1)	(2)	(3)
1. Kerinci	57.338.939	57.338.939
2. Merangin	68.215.748	68.215.748
3. Sarolangun	74.062.618	68.686.868
4. Batang Hari	82.608.760	81.408.713
5. Muaro Jambi	95.332.059	90.453.578
6. Tanjung Jabung Timur	114.222.256	66.672.087
7. Tanjung Jabung Barat	166.332.457	109.930.663
8. Tebo	67.299.408	65.586.738
9. Bungo	71.750.280	71.750.280
10. Kota Jambi	68.296.973	67.511.229
11. Kota Sungai Penuh	101.944.476	101.944.476

Catatan: **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

4.3.2 PDRB Per kapita Menurut Kab/Kota dengan Migas

Jika dibandingkan PDRB per kapita dengan migas ke semua kabupaten/kota di Provinsi Jambi, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kabupaten yang memiliki PDRB per kapita dengan migas terbesar 166,33 juta rupiah sedangkan PDRB per kapita tanpa migasnya mencapai 109,93 juta rupiah. Ada tiga pengelompokan PDRB per kapita dengan migas : kelompok pertama yaitu kabupaten/kota dengan PDRB per kapita dengan migas antara 20 juta sampai 60 juta rupiah, yaitu Kabupaten Kerinci (57,34 juta rupiah).

Pada kelompok kedua dengan PDRB per kapita antara 61 juta sampai 80 juta rupiah adalah Kabupaten Tebo (67,23 Juta rupiah), Kabupaten Merangin (68,22 juta rupiah), Kota Jambi (68,29 juta rupiah), Kabupaten Bungo (71,75 juta rupiah), Kabupaten Sarolangun (74,06 juta rupiah), sedangkan pada kelompok ketiga dengan PDRB per kapita lebih dari 80 juta adalah Kabupaten Batanghari (82,61 juta rupiah), Kabupaten Muaro Jambi (95,33 juta rupiah), Kota Sungai Penuh (101,94 juta rupiah), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (114,22 juta rupiah), dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (166,33 juta rupiah),

4.3.3 PDRB Per kapita Menurut Kabupaten/Kota Tanpa Migas

Untuk melihat PDRB per kapita secara lebih riil pada suatu wilayah dapat digunakan

penghitungan PDRB per kapita tanpa migas, karena pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi serta nilai tambah yang terbentuk lebih banyak digunakan untuk kepentingan nasional.

Walaupun pada kenyataannya pada PDRB tanpa migas masih terdapat kegiatan yang dikelola oleh perusahaan berskala nasional khususnya di kategori industri pengolahan sehingga surplus usaha yang terbentuk akan lebih banyak mengalir keluar daerah.

Bila dihitung tanpa migas maka pada tahun 2024 PDRB perkapita tertinggi terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 109,93 juta rupiah, diikuti oleh Kota Sungai Penuh yang sebesar 101,94 juta rupiah. Sebaliknya kabupaten yang memiliki PDRB perkapita terkecil adalah Kabupaten Kerinci sebesar 57,34 juta rupiah.

4.3.4 PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020–2024

Dari tahun 2020 hingga 2024 telah terjadi kenaikan PDRB perkapita di seluruh Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024 tidak ada daerah yang mempunyai PDRB perkapita di bawah 50 juta rupiah. Hal ini berbeda dengan keadaan tahun 2020, di mana terdapat 6 (enam) kabupaten/kota dengan PDRB perkapita di bawah 50 juta rupiah.

Tabel 4.9
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Dengan Migas), 2020 dan 2024

Kabupaten/Kota (1)	PDRB Perkapita	
	2020 (2)	2024** (3)
1. Kerinci	41.859.168	57.338.939
2. Merangin	44.298.308	68.215.748
3. Sarolangun	49.916.886	74.062.618
4. Batang Hari	54.600.275	82.608.760
5. Muaro Jambi	60.848.118	95.332.059
6. Tanjung Jabung Timur	85.307.299	114.222.256
7. Tanjung Jabung Barat	117.255.792	166.332.457
8. Tebo	43.752.755	67.299.408
9. Bungo	47.937.445	71.750.280
10. Kota Jambi	48.730.918	68.296.973
11. Kota Sungai Penuh	78.534.544	101.944.476
Provinsi Jambi	57.957.734	86.721.509

Catatan: **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Bab 5

Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota dengan Provinsi

Untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan data PDRB provinsi dengan data PDRB kabupaten/kota dapat dilihat dari beberapa indikator yang penting seperti laju pertumbuhan PDRB dan PDRB perkapita. Indikator-indikator ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi dan kajian terhadap hasil pembangunan di suatu daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijaksanaan dalam bidang ekonomi makro.



BAB 5 PERBANDINGAN PDRB KABUPATEN/KOTA DENGAN PROVINSI

Secara teoritis PDRB provinsi merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (sektor-sektor ekonomi) dalam suatu provinsi, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu provinsi. Tetapi, dalam kenyataannya masih terdapat perbedaan antara data provinsi dengan data jumlah seluruh kabupaten/kota. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan harga disetiap kabupaten/kota dengan provinsi serta sumber data yang digunakan.

Untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan data PDRB provinsi dengan data PDRB kabupaten/kota dapat dilihat dari beberapa indikator yang penting seperti laju pertumbuhan PDRB dan PDRB perkapita. Indikator-indikator ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi dan kajian terhadap hasil pembangunan di suatu daerah.

Laju pertumbuhan PDRB menggambarkan pengukuran secara kuantitas hasil pembangunan, dan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijaksanaan dalam bidang ekonomi makro. Perbedaan laju pertumbuhan antar kabupaten/kota maupun Provinsi Jambi pada tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.

Laju pertumbuhan PDRB provinsi merupakan resultan dari pertumbuhan di kabupaten/kota, meskipun besaran hasil hitungan tersebut secara matematis dapat menunjukkan perbedaan. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan PDRB dengan migas ada 5 (lima) kabupaten yang berada di bawah angka pertumbuhan Provinsi Jambi (4,51 persen), yaitu Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo. Sementara, 6 (enam) kabupaten lain memiliki pertumbuhan dengan migas berada di atas provinsi adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh.

5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020–2024

Apabila roda perekonomian bergerak maka diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (Fahmi, 2019). Apabila pendapatan meningkat maka tenaga kerja yang terserap membuat dunia usaha berkembang (Pangiuk, 2018) sehingga perekonomian berkembang.

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2020–2024 berada di antara minus 4,24 persen sampai 6,17 persen. Berikut ini disajikan tabel laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2020 sampai 2024.

Tabel 5.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Dengan Migas),
2020–2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kerinci	3,81	3,89	4,43	5,73	4,57
2. Merangin	0,78	5,24	5,72	5,28	4,55
3. Sarolangun	-0,25	6,61	6,73	4,01	3,70
4. Batang Hari	-0,43	4,85	12,26	3,71	2,99
5. Muaro Jambi	0,35	3,96	8,05	6,28	6,17
6. Tanjung Jabung Timur	-3,44	0,14	0,57	2,16	4,73
7. Tanjung Jabung Barat	-0,29	1,36	2,57	3,50	4,45
8. Tebo	-0,03	4,29	6,29	4,50	3,97
9. Bungo	-0,48	4,99	4,73	4,69	3,30
10. Kota Jambi	-4,24	4,13	5,37	6,18	4,98
11. Kota Sungai Penuh	-0,16	3,67	4,43	4,90	5,10
Provinsi Jambi	-0,51	3,70	5,12	4,67	4,51

Catatan: *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Laju pertumbuhan tertinggi tahun 2024 dipegang oleh Kabupaten Muaro Jambi sebesar 6,17 persen. Sedangkan laju pertumbuhan terendah terjadi di Kabupaten Batang Hari sebesar 2,99 persen. Sebagian besar kabupaten/kota mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2023,

Tabel 5.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Tanpa Migas),
2020–2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kerinci	3,81	3,89	4,43	5,73	4,57
2. Merangin	0,78	5,24	5,72	5,28	4,55
3. Sarolangun	0,12	7,40	7,14	4,05	3,58
4. Batang Hari	-0,22	5,10	12,62	4,03	3,03
5. Muaro Jambi	0,06	4,67	8,38	6,33	6,20
6. Tanjung Jabung Timur	0,62	2,21	2,92	5,96	5,84
7. Tanjung Jabung Barat	-0,20	3,98	5,51	7,39	6,08
8. Tebo	0,52	4,50	6,19	4,59	3,93
9. Bungo	-0,48	4,99	4,73	4,69	3,30
10. Kota Jambi	-4,42	4,17	5,50	6,52	5,13
11. Kota Sungai Penuh	-0,16	3,67	4,43	4,90	5,10
Provinsi Jambi	-0,29	5,23	6,42	5,78	4,67

Catatan: *Angka Sementara

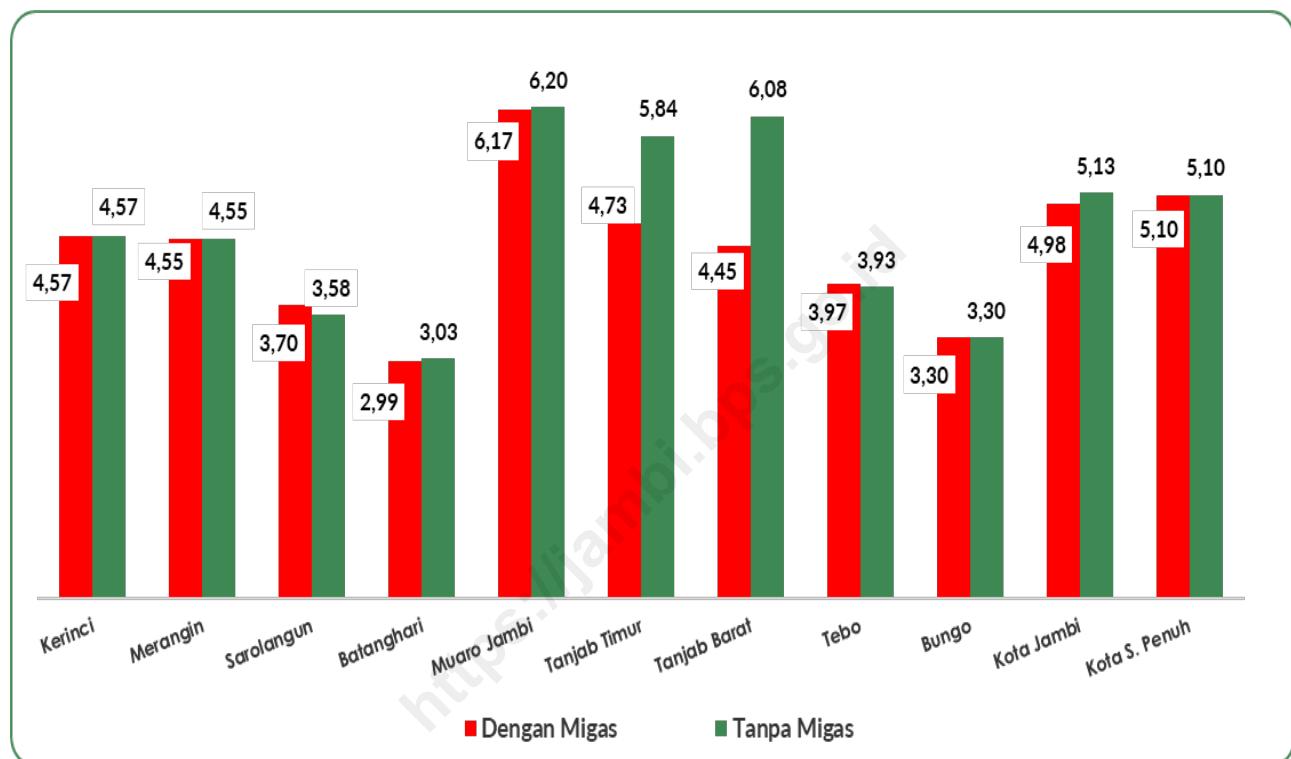
**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Pengaruh migas di dalam pembentukan perekonomian Provinsi Jambi cukup besar. Ada 7 (tujuh) kabupaten/kota yang mempunyai produksi migas yaitu Kabupaten Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo dan Kota Jambi.

Untuk Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, dan Kota Sungai Penuh tidak ada perbedaan antara pertumbuhan dengan migas serta tanpa migas.

Tahun 2024 ada 5 (lima) kabupaten penghasil migas yang memiliki pertumbuhan tanpa migasnya berada di atas Provinsi Jambi. Sedangkan 6 (enam) Kabupaten/Kota lain laju pertumbuhan ekonominya dibawah Provinsi Jambi.



Sumber: BPS Provinsi Jambi

Gambar 5.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Dengan Migas dan Tanpa Migas, 2024

Daftar Pustaka

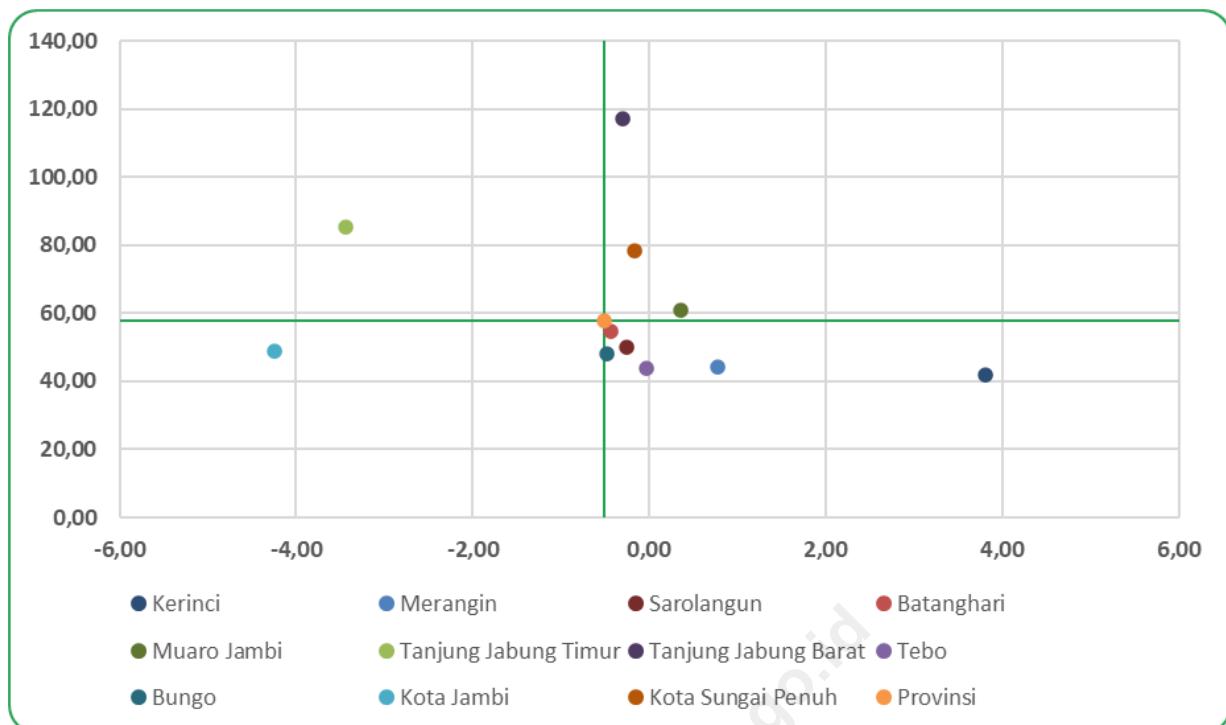
<https://jambi.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, A. 2019. *Faktor Pendidikan dan Kesehatan Berpengaruh Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi*. Jurnal Development, 89–121
- Pangiuk, A. 2018. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013*. 44 | Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, 2(2).
- Pesurnay, R. T. J. M. 2018. *Analisis Tipologi Klassen dan Penentu Sektor Unggulan di Kota Ambon Provinsi Maluku*. Jurnal Ekonomi Peluang , 12(1), 51–71.
- Sarnowo, H. 2016. *Klasifikasi Wilayah Provinsi di Indonesia dengan Pendekatan Tipologi Klassen*. Efektif Jurnal Ekonomi Bisnis, 7(1), 45–57

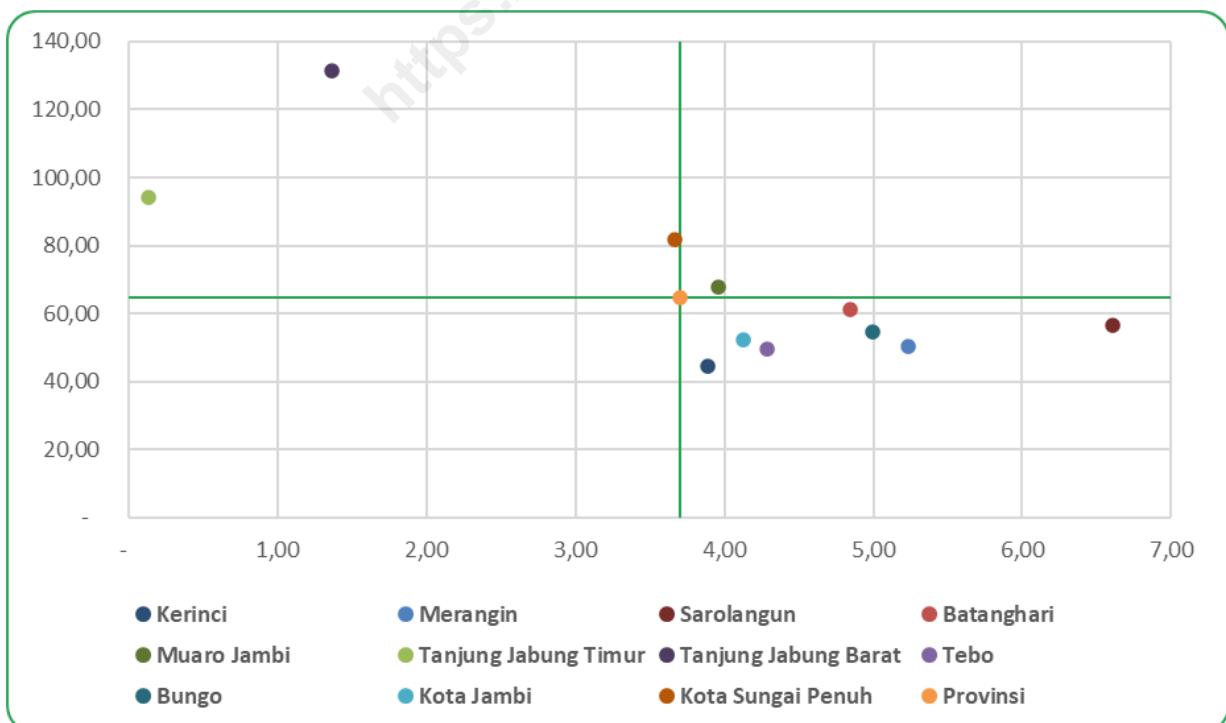
Lampiran

Lampiran 1 Plot Kabupaten/Kota Berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita, 2020



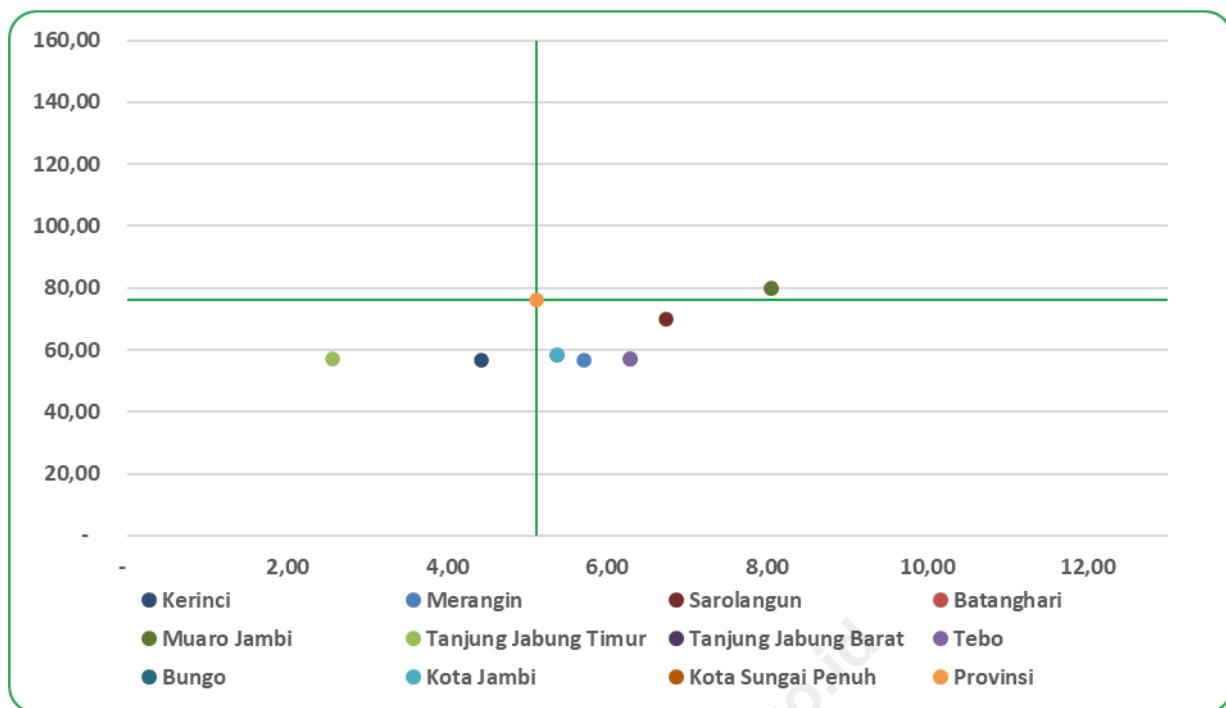
Sumber: BPS Provinsi Jambi

Lampiran 2 Plot Kabupaten/Kota Berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita, 2021



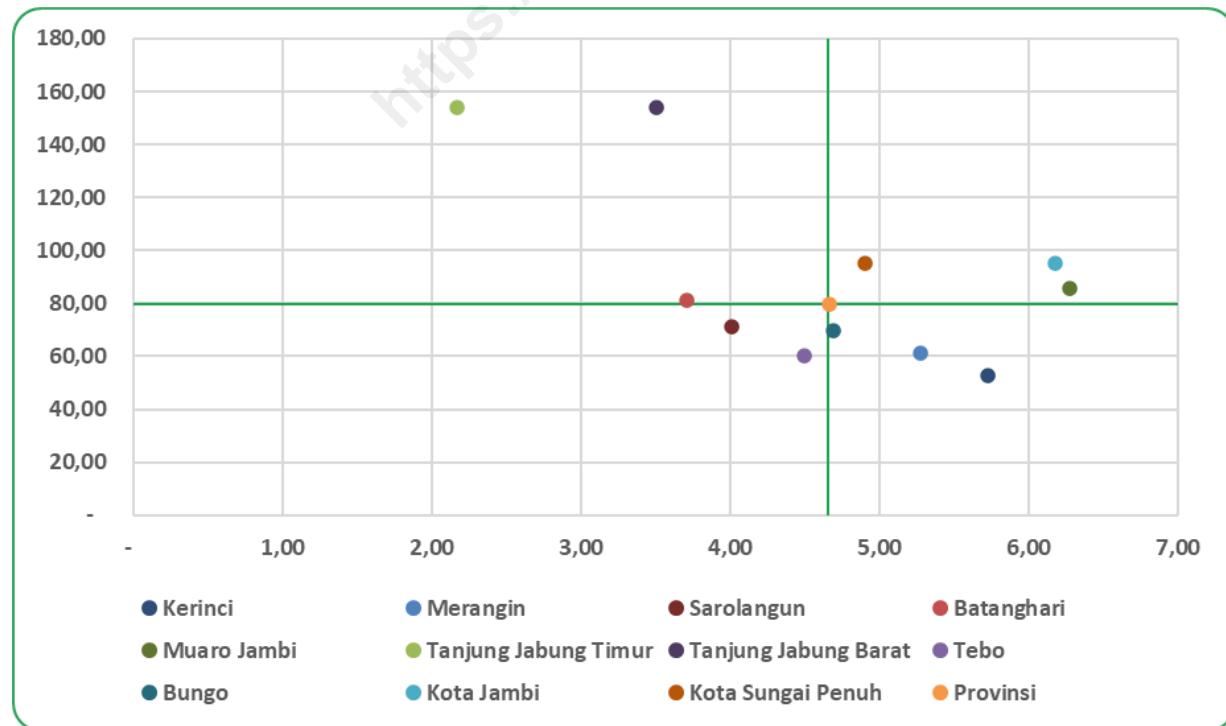
Sumber: BPS Provinsi Jambi

Lampiran 3 Plot Kabupaten/Kota Berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB perkapita, 2022



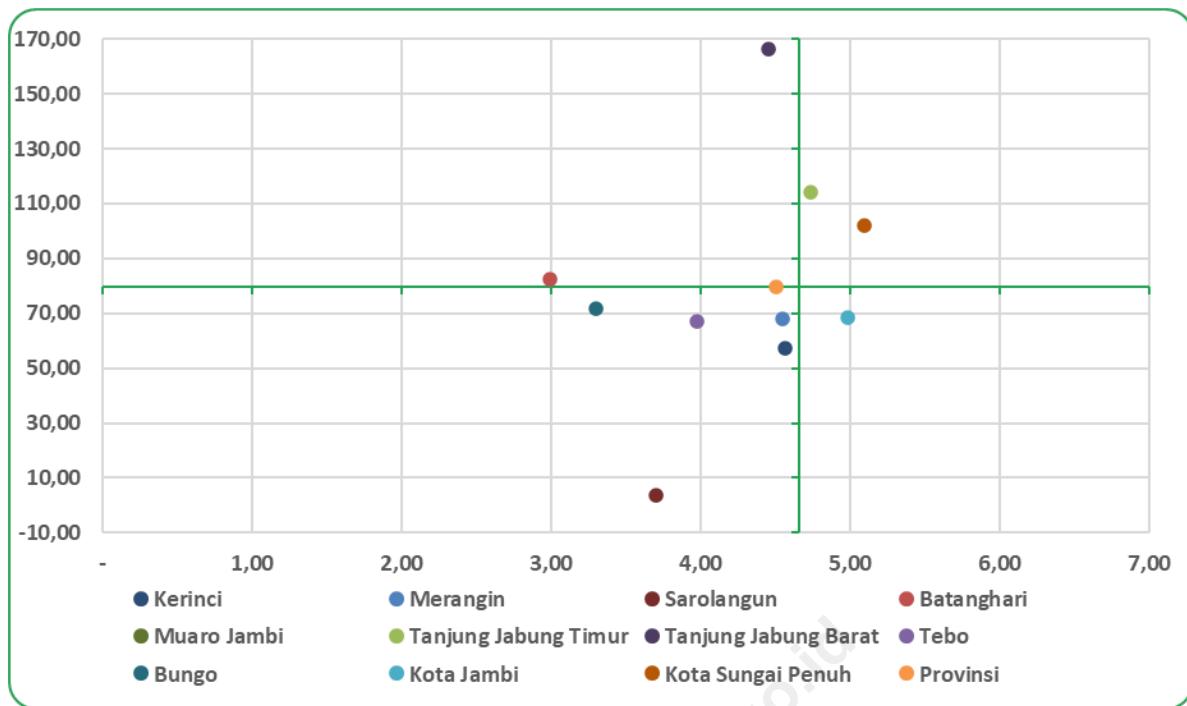
Sumber: BPS Provinsi Jambi

Lampiran 4 Plot Kabupaten/Kota Berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB perkapita, 2023



Sumber: BPS Provinsi Jambi

Lampiran 5 Plot Kabupaten/Kota Berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB perkapita, 2024



Sumber: BPS Provinsi Jambi

Lampiran 6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, 2024

Kategori	Uraian	Kerinci	Merangin	Sarolangun	Batanghari	Muaro Jambi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.188.268,46	13.410.653,68	7.216.609,56	11.310.897,16	19.090.492,86
B	Pertambangan dan Penggalian	256.147,52	551.964,20	4.799.010,69	3.441.124,67	3.913.822,63
C	Industri Pengolahan	406.397,55	1.915.039,36	882.285,59	2.629.773,68	5.590.870,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.187,68	17.193,68	10.132,20	14.922,79	19.658,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	39.837,90	36.988,70	28.259,53	16.482,25	34.315,00
F	Konstruksi	1.760.098,52	1.404.138,80	2.782.297,04	1.365.791,17	2.946.593,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.517.191,35	3.280.992,44	2.127.432,62	2.485.901,95	2.373.345,54
H	Transportasi dan Pergudangan	293.448,21	433.599,87	477.522,46	432.700,58	1.201.359,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	98.941,76	437.278,00	422.646,45	88.732,09	210.631,53
J	Informasi dan Komunikasi	1.044.492,93	935.675,12	770.010,72	932.786,57	908.037,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	133.751,18	298.515,23	547.515,17	379.581,43	578.744,91
L	Real Estate	216.247,24	443.547,21	269.270,61	274.509,03	474.313,68
M,N	Jasa Perusahaan	7.092,50	36.509,35	73.990,77	24.607,58	515.299,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	789.892,94	875.978,45	1.113.156,57	1.068.449,16	1.047.344,06
P	Jasa Pendidikan	546.390,54	761.095,97	558.783,57	1.056.786,88	664.990,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	222.725,22	352.212,67	328.583,47	395.712,10	401.281,38
R,S,T,U	Jasa lainnya	192.138,04	280.991,70	293.722,13	231.043,85	504.888,65
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		14.719.249,55	25.472.374,42	22.701.229,15	26.149.802,94	40.475.990,33
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		14.719.249,55	25.472.374,42	21.053.486,78	25.769.928,02	38.404.689,84

Lanjutan Lampiran 6

Kategori	Uraian	Tanjung Jabung Timur	Tanjung Jabung Barat	Tebo	Bungo	Kota Jambi	Kota Sungai Penuh
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.596.070,56	19.269.216,51	13.562.970,26	7.421.665,62	362.804,04	482.111,68
B	Pertambangan dan Penggalian	9.837.390,02	14.446.572,94	1.184.588,02	3.801.623,94	521.204,12	81.716,17
C	Industri Pengolahan	2.197.184,96	9.777.003,90	1.461.635,19	1.769.015,37	4.543.817,93	63.774,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.940,96	18.910,88	20.911,30	17.110,67	107.769,72	2.767,45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19.879,95	37.005,56	10.108,02	48.540,21	109.664,54	23.300,74
F	Konstruksi	1.642.590,23	2.908.712,08	1.337.647,85	2.965.096,05	3.655.873,04	1.046.246,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.760.642,68	2.725.945,21	2.584.657,33	4.318.841,71	14.752.214,35	3.245.366,15
H	Transportasi dan Pergudangan	449.518,08	523.481,51	314.336,24	686.025,92	4.818.281,74	425.441,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	119.889,49	292.987,08	70.310,95	691.914,61	1.140.304,12	117.658,33
J	Informasi dan Komunikasi	550.077,47	1.202.915,12	807.337,42	1.322.899,47	1.917.529,62	1.385.391,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	260.207,38	602.285,72	260.832,84	999.497,39	2.310.396,86	486.194,38
L	Real Estate	205.848,62	428.551,92	381.331,28	641.236,26	1.022.859,91	263.523,32
M,N	Jasa Perusahaan	561.078,30	894.739,57	15.907,89	71.075,63	1.890.860,08	634.237,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	700.010,47	940.612,28	876.894,63	1.063.549,38	3.077.792,94	581.949,80
P	Jasa Pendidikan	1.085.974,02	1.029.928,92	477.288,98	1.191.305,96	1.740.201,15	948.108,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	200.342,43	323.411,63	221.041,40	193.567,81	1.089.937,99	261.651,14
R,S,T,U	Jasa lainnya	102.617,96	310.569,13	321.122,71	153.406,59	313.963,68	231.355,12
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		27.296.263,56	55.732.849,97	23.908.922,31	27.356.372,61	43.375.475,83	10.280.794,59
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		15.932.962,00	36.834.357,38	23.300.475,64	27.356.372,61	42.876.448,75	10.280.794,59

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Lampiran 7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, 2024

Kategori	Uraian	Kerinci	Merangin	Sarolangun	Batanghari	Muaro Jambi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.566.194,68	5.841.824,35	3.404.594,28	5.496.217,60	8.094.816,13
B	Pertambangan dan Penggalian	142.117,81	248.318,06	4.136.467,60	2.990.642,81	2.977.877,32
C	Industri Pengolahan	210.027,79	922.025,82	453.694,93	1.474.042,82	2.944.697,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.769,66	8.231,00	5.378,97	8.673,12	9.683,43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22.688,10	19.853,73	15.783,22	10.648,14	17.007,96
F	Konstruksi	1.138.907,35	830.770,61	1.562.600,59	878.092,37	1.856.367,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	691.402,67	1.448.113,85	770.907,72	1.043.590,45	1.015.628,51
H	Transportasi dan Pergudangan	202.281,96	252.370,40	277.642,92	240.756,82	712.177,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	65.301,40	253.859,93	264.539,15	57.884,35	128.843,25
J	Informasi dan Komunikasi	640.812,12	606.073,29	508.970,23	476.571,50	561.129,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	77.194,51	157.712,26	288.871,24	216.978,71	313.647,81
L	Real Estate	122.527,79	253.620,16	160.526,43	154.500,21	234.594,19
M,N	Jasa Perusahaan	3.301,34	18.209,00	34.893,32	11.904,90	244.740,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	400.747,33	391.124,80	455.152,34	542.790,71	507.159,35
P	Jasa Pendidikan	318.971,50	444.645,09	380.986,77	679.829,33	372.926,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	147.920,37	201.406,62	205.873,01	234.019,69	237.210,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	123.116,19	180.022,25	192.661,75	145.875,52	282.729,62
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		7.877.282,55	12.078.181,23	13.119.544,47	14.663.019,04	20.511.237,52
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		7.877.282,55	12.078.181,23	11.536.181,69	14.292.310,68	18.589.968,95

Lanjutan Lampiran 7

Kategori	Uraian	Tanjung Jabung Timur	Tanjung Jabung Barat	Tebo	Bungo	Kota Jambi	Kota Sungai Penuh
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.596.070,56	19.269.216,51	13.562.970,26	7.421.665,62	362.804,04	482.111,68
B	Pertambangan dan Penggalian	9.837.390,02	14.446.572,94	1.184.588,02	3.801.623,94	521.204,12	81.716,17
C	Industri Pengolahan	2.197.184,96	9.777.003,90	1.461.635,19	1.769.015,37	4.543.817,93	63.774,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.940,96	18.910,88	20.911,30	17.110,67	107.769,72	2.767,45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19.879,95	37.005,56	10.108,02	48.540,21	109.664,54	23.300,74
F	Konstruksi	1.642.590,23	2.908.712,08	1.337.647,85	2.965.096,05	3.655.873,04	1.046.246,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.760.642,68	2.725.945,21	2.584.657,33	4.318.841,71	14.752.214,35	3.245.366,15
H	Transportasi dan Pergudangan	449.518,08	523.481,51	314.336,24	686.025,92	4.818.281,74	425.441,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	119.889,49	292.987,08	70.310,95	691.914,61	1.140.304,12	117.658,33
J	Informasi dan Komunikasi	550.077,47	1.202.915,12	807.337,42	1.322.899,47	1.917.529,62	1.385.391,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	260.207,38	602.285,72	260.832,84	999.497,39	2.310.396,86	486.194,38
L	Real Estate	205.848,62	428.551,92	381.331,28	641.236,26	1.022.859,91	263.523,32
M,N	Jasa Perusahaan	561.078,30	894.739,57	15.907,89	71.075,63	1.890.860,08	634.237,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	700.010,47	940.612,28	876.894,63	1.063.549,38	3.077.792,94	581.949,80
P	Jasa Pendidikan	1.085.974,02	1.029.928,92	477.288,98	1.191.305,96	1.740.201,15	948.108,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	200.342,43	323.411,63	221.041,40	193.567,81	1.089.937,99	261.651,14
R,S,T,U	Jasa lainnya	102.617,96	310.569,13	321.122,71	153.406,59	313.963,68	231.355,12
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		18.695.008,58	34.456.447,81	12.234.472,54	14.851.303,01	22.896.424,32	5.490.462,45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		7.890.646,87	18.091.613,12	11.672.529,78	14.851.303,01	22.507.143,41	5.490.462,45

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Lampiran 8 Distribusi PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, 2024

Kategori	Uraian	Kerinci	Merangin	Sarolangun	Batanghari	Muaro Jambi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	48,84	52,65	31,79	43,25	47,16
B	Pertambangan dan Penggalian	1,74	2,17	21,14	13,16	9,67
C	Industri Pengolahan	2,76	7,52	3,89	10,06	13,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,07	0,04	0,06	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,27	0,15	0,12	0,06	0,08
F	Konstruksi	11,96	5,51	12,26	5,22	7,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,31	12,88	9,37	9,51	5,86
H	Transportasi dan Pergudangan	1,99	1,70	2,10	1,65	2,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,67	1,72	1,86	0,34	0,52
J	Informasi dan Komunikasi	7,10	3,67	3,39	3,57	2,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,91	1,17	2,41	1,45	1,43
L	Real Estate	1,47	1,74	1,19	1,05	1,17
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,14	0,33	0,09	1,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,37	3,44	4,90	4,09	2,59
P	Jasa Pendidikan	3,71	2,99	2,46	4,04	1,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,51	1,38	1,45	1,51	0,99
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,31	1,10	1,29	0,88	1,25
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		100,00	100,00	92,74	98,55	94,88

Lanjutan Lampiran 8

Kategori	Uraian	Tanjung Jabung Timur	Tanjung Jabung Barat	Tebo	Bungo	Kota Jambi	Kota Sungai Penuh
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,16	34,57	56,73	27,13	0,84	4,69
B	Pertambangan dan Penggalian	36,04	25,92	4,95	13,90	1,20	0,79
C	Industri Pengolahan	8,05	17,54	6,11	6,47	10,48	0,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,09	0,06	0,25	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,04	0,18	0,25	0,23
F	Konstruksi	6,02	5,22	5,59	10,84	8,43	10,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,11	4,89	10,81	15,79	34,01	31,57
H	Transportasi dan Pergudangan	1,65	0,94	1,31	2,51	11,11	4,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,44	0,53	0,29	2,53	2,63	1,14
J	Informasi dan Komunikasi	2,02	2,16	3,38	4,84	4,42	13,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,95	1,08	1,09	3,65	5,33	4,73
L	Real Estate	0,75	0,77	1,59	2,34	2,36	2,56
M,N	Jasa Perusahaan	2,06	1,61	0,07	0,26	4,36	6,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,56	1,69	3,67	3,89	7,10	5,66
P	Jasa Pendidikan	3,98	1,85	2,00	4,35	4,01	9,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,73	0,58	0,92	0,71	2,51	2,55
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,38	0,56	1,34	0,56	0,72	2,25
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		58,37	66,09	97,46	100,00	98,85	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Lampiran 9 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, 2024

Kategori	Uraian	Kerinci	Merangin	Sarolangun	Batanghari	Muaro Jambi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,81	2,77	4,64	6,36	3,56
B	Pertambangan dan Penggalian	10,09	3,75	-0,10	-11,32	-1,81
C	Industri Pengolahan	2,84	1,91	3,04	7,57	3,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,98	5,45	5,33	8,16	11,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,35	0,05	4,32	3,69	-0,30
F	Konstruksi	5,08	4,40	4,57	7,30	45,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,11	7,05	6,29	6,28	5,26
H	Transportasi dan Pergudangan	6,29	5,80	7,84	9,27	4,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,79	7,78	8,53	9,93	7,67
J	Informasi dan Komunikasi	3,77	6,22	4,98	4,56	5,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,87	0,52	2,95	3,34	2,07
L	Real Estate	4,00	2,50	5,28	4,27	5,48
M,N	Jasa Perusahaan	6,13	2,13	9,00	9,19	8,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,72	13,10	7,94	15,28	5,67
P	Jasa Pendidikan	7,33	13,50	9,68	13,84	14,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,33	14,14	16,06	13,08	13,38
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,90	7,61	7,55	7,61	7,60
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,57	4,55	3,70	2,99	6,17
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		4,57	4,55	3,58	3,03	6,20

Lanjutan Lampiran 9

Kategori	Uraian	Tanjung Jabung Timur	Tanjung Jabung Barat	Tebo	Bungo	Kota Jambi	Kota Sungai Penuh
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,93	3,62	6,70	6,13	2,20	6,13
B	Pertambangan dan Penggalian	4,06	3,11	-19,74	-7,37	-2,51	12,13
C	Industri Pengolahan	3,79	5,38	8,67	5,13	3,19	4,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,91	11,01	10,29	6,88	6,33	4,57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,57	2,11	9,53	3,37	2,76	-5,44
F	Konstruksi	8,57	8,96	5,97	4,67	4,49	2,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,53	4,91	9,59	4,93	2,84	3,95
H	Transportasi dan Pergudangan	7,00	6,06	8,90	8,74	6,35	14,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,65	9,56	6,68	14,06	11,25	9,46
J	Informasi dan Komunikasi	5,04	4,62	4,73	5,00	4,87	4,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,05	2,43	2,02	2,13	1,34	-0,91
L	Real Estate	5,93	5,79	1,96	4,98	3,28	2,27
M,N	Jasa Perusahaan	10,15	9,14	10,44	10,74	12,35	5,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,30	11,72	7,70	15,86	10,00	7,69
P	Jasa Pendidikan	11,03	8,06	9,93	11,67	7,39	5,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,86	13,60	7,20	15,12	13,13	12,92
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,32	7,29	7,55	9,66	8,34	9,05
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,73	4,45	3,97	3,30	4,98	5,10
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		5,84	6,08	3,93	3,30	5,13	5,10

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Lampiran 10 Indeks Implisit PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, 2024

Kategori	Uraian	Kerinci	Merangin	Sarolangun	Batanghari	Muaro Jambi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	201,57	229,56	211,97	205,79	235,84
B	Pertambangan dan Penggalian	180,24	222,28	116,02	115,06	131,43
C	Industri Pengolahan	193,50	207,70	194,47	178,41	189,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	164,14	208,89	188,37	172,06	203,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	175,59	186,31	179,05	154,79	201,76
F	Konstruksi	154,54	169,02	178,06	155,54	158,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	219,44	226,57	275,96	238,21	233,68
H	Transportasi dan Pergudangan	145,07	171,81	171,99	179,73	168,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	151,52	172,25	159,77	153,29	163,48
J	Informasi dan Komunikasi	163,00	154,38	151,29	195,73	161,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	173,27	189,28	189,54	174,94	184,52
L	Real Estate	176,49	174,89	167,74	177,68	202,18
M,N	Jasa Perusahaan	214,84	200,50	212,05	206,70	210,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	197,10	223,96	244,57	196,84	206,51
P	Jasa Pendidikan	171,30	171,17	146,67	155,45	178,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	150,57	174,88	159,60	169,09	169,17
R,S,T,U	Jasa lainnya	156,06	156,09	152,45	158,38	178,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		186,86	210,90	173,03	178,34	197,34
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		186,86	210,90	182,50	180,31	206,59

Lanjutan Lampiran 10

Kategori	Uraian	Tanjung Jabung Timur	Tanjung Jabung Barat	Tebo	Bungo	Kota Jambi	Kota Sungai Penuh
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	210,77	234,11	215,40	238,09	207,44	184,21
B	Pertambangan dan Penggalian	100,29	109,09	111,44	123,86	129,93	176,71
C	Industri Pengolahan	166,46	156,98	188,01	187,38	186,96	176,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	222,67	237,63	222,16	241,23	206,76	190,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	167,51	206,47	180,31	154,99	211,88	159,75
F	Konstruksi	161,12	163,59	160,76	170,65	164,71	153,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	230,91	226,61	232,48	231,10	226,80	228,95
H	Transportasi dan Pergudangan	188,35	169,84	157,27	166,23	176,08	161,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	168,16	176,79	143,21	163,53	163,90	172,10
J	Informasi dan Komunikasi	168,72	168,35	150,04	149,65	132,96	158,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	189,68	179,45	184,16	187,10	181,01	180,19
L	Real Estate	176,78	182,10	177,83	183,35	175,52	196,95
M,N	Jasa Perusahaan	233,24	197,50	204,21	208,04	238,07	182,76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	212,80	184,76	242,63	240,29	207,88	214,12
P	Jasa Pendidikan	186,69	164,41	170,81	157,59	160,81	188,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	185,88	161,49	171,93	139,04	140,21	157,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	178,15	156,00	147,21	152,95	161,64	169,23
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		146,01	161,75	195,42	184,20	189,44	187,25
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		201,92	203,60	199,62	184,20	190,50	187,25

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Lampiran 11 Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, 2024

Kategori	Uraian	Kerinci	Merangin	Sarolangun	Batanghari	Muaro Jambi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,02	13,57	10,48	2,90	13,03
B	Pertambangan dan Penggalian	1,31	4,20	-11,35	-20,31	-8,03
C	Industri Pengolahan	8,46	6,34	5,73	2,14	6,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,33	3,57	4,85	-1,45	2,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,63	3,52	3,75	0,25	2,83
F	Konstruksi	1,12	1,68	0,38	2,61	0,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,13	2,17	3,59	5,65	5,27
H	Transportasi dan Pergudangan	1,37	1,43	2,72	2,39	1,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,37	2,53	0,80	0,38	0,37
J	Informasi dan Komunikasi	0,62	0,84	1,64	0,54	0,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,08	3,41	3,95	1,77	2,69
L	Real Estate	1,06	1,83	0,58	0,57	2,05
M,N	Jasa Perusahaan	3,69	3,55	3,03	2,53	2,68
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,39	2,82	3,55	4,27	3,44
P	Jasa Pendidikan	0,61	2,93	0,78	0,74	1,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,45	0,44	1,54	0,74	1,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,45	3,62	2,74	2,84	2,84
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,01	8,16	1,79	-0,22	6,22
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		5,01	8,16	1,71	-0,33	6,52

Lanjutan Lampiran 11

Kategori	Uraian	Tanjung Jabung Timur	Tanjung Jabung Barat	Tebo	Bungo	Kota Jambi	Kota Sungai Penuh
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,52	10,40	13,83	12,59	2,31	6,06
B	Pertambangan dan Penggalian	4,92	4,47	-15,64	-23,53	7,10	2,57
C	Industri Pengolahan	-1,06	-1,34	8,59	7,41	5,07	8,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,92	3,39	2,82	1,83	2,19	3,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,61	6,09	7,30	3,74	3,11	2,23
F	Konstruksi	0,64	0,91	0,34	1,10	0,67	0,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,14	3,77	4,17	4,94	3,95	5,90
H	Transportasi dan Pergudangan	1,70	1,38	1,02	2,00	2,73	4,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,07	0,68	0,10	1,69	2,89	2,45
J	Informasi dan Komunikasi	0,20	0,51	0,56	1,06	-1,45	1,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,95	3,01	1,81	1,06	2,35	1,46
L	Real Estate	1,08	0,95	1,63	0,78	1,67	2,02
M,N	Jasa Perusahaan	2,84	3,31	9,23	3,51	3,44	2,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,21	3,36	3,36	4,44	3,25	3,75
P	Jasa Pendidikan	0,97	0,89	1,03	0,03	0,74	0,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,02	0,57	1,87	2,16	1,82	0,89
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,98	2,78	2,80	2,64	2,91	2,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		3,95	4,94	8,64	0,80	2,91	3,22
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		3,76	6,00	8,76	0,80	2,81	3,22

Sumber: BPS Provinsi Jambi



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



DATA MENCERDASKAN BANGSA

https://jambi.bps.go.id



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI**

Jl. A. Yani No. 4 Telanaipura, Jambi 36122 Telp. 0741-60497
Homepage: <https://www.jambi.bps.go.id>
Email: bps1500@bps.go.id

